



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 terdapat penataan kode dan nama rekening akun pendapatan dan belanja, serta dilakukan penataan kembali terhadap penggunaan dan mapping rekening akun;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kode dan nama rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Signature]

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 06);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 39).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

- (1) Beberapa rincian kode dan nama akun rekening Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada kolom Rekening Permendagri 13 Mapping Rekening Akun diganti dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel 1 Perubahan Akun Rekening Permendagri 13 pada Tahun 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Beberapa rincian kode dan nama akun rekening Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pendapatan-LO dan Beban pada kolom Rekening Akrual (Permendagri 64) Mapping Rekening Akun diganti dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel 2 Perubahan Akun Rekening Akrual pada Tahun 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Bagan Akun Standar (BAS) Lampiran III Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014, diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel 3 Bagan Akun Standar (BAS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan kode dan nama rekening akun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan adanya beberapa perubahan terhadap mapping rekening akun;
- (5) Mapping Rekening Akun Lampiran IV Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2015, diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel 3 Mapping Rekening Akun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN IV
4	KABAG HUKUM
5	KA. BPKAD
6	SEK. BPKAD
7	KABID
8	KASUBBID

Ditetapkan di
pada tanggal

Menggala
8 Nopember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 9 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

S O B R I

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 42

- (1) Beberapa rincian kode dan nama akun rekening Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada kolom Rekening Permendagri 13 Mapping Rekening Akun diganti dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel 1 Perubahan Akun Rekening Permendagri 13 pada Tahun 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Beberapa rincian kode dan nama akun rekening Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pendapatan-LO dan Beban pada kolom Rekening Akrual (Permendagri 64) Mapping Rekening Akun diganti dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel.2 Perubahan Akun Rekening Akrual pada Tahun 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Bagan Akun Standar (BAS) Lampiran III Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014, diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel 3 Bagan Akun Standar (BAS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan kode dan nama rekening akun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan adanya beberapa perubahan terhadap mapping rekening akun;
- (5) Mapping Rekening Akun Lampiran IV Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2015, diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel 3 Mapping Rekening Akun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di
Menggala
pada tanggal

Menggala
8 Nopember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI

Diundangkan di
Menggala
pada tanggal 9 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

S O B R I



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TABEL 1
PERUBAHAN AKUN REKENING PERMENDAGRI 13 PADA TA

TABLE I

PERUBAHAN AKHUN BEKENNING PERMENDASBRI 13 PADA TAHUN 2016

TAHUN ANGGARAN 2016						
NO	KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING			
			URAIAN			
1	1 1 1 1 1 15	Kas di Deposito Bank Lampung				
2	1 1 1 1 16	Kas di Deposito Bank Lampung				
3	1 1 1 1 17	Kas di Deposito Bank Lampung				
4	1 1 1 1 18	Kas di Deposito Bank Lampung				
5	1 1 1 1 19	Kas di Deposito Bank Lampung				
6	1 1 1 1 20	Kas di Deposito Bank Lampung				
7	1 1 1 1 21	Kas di Deposito Bank Lampung				
8	1 1 1 1 22	Kas di Deposito Bank Lampung				
9	1 1 1 1 23	Kas di Deposito Bank Lampung				
10	1 1 1 1 24	Kas di Deposito Bank Lampung				
11	1 1 1 1 5 1	Kas Dibendahara Puskesmas				
12	1 1 3 2 1	Plutang Retribusi				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URAIAN				KODE REKENING	URAIAN			
41						1 1 3 2 30				Piutang Retribusi Izin Perikanan
42						1 1 3 2 31				Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
43						1 1 3 2 32				Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
44	1 1 4 2 1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Bendahara				1 1 4 2 1				Bagian Lancar Tuntutan Pert bendaharaan
45	1 1 4 2 2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Bukan Bendahara				1 1 4 2 2				Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
46	1 1 4 7	Pendapatan Lainnya				1 1 4 7				Lain-lain Piutang Lainnya
47						1 1 4 8				Penyisihan Piutang
48						1 1 4 8 1				Penyisihan Piutang Pajak Daerah
49						1 1 4 8 2				Penyisihan Piutang Retribusi
50						1 1 4 8 3				Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
51						1 1 4 8 4				Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
52						1 1 4 8 5				Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
53						1 1 4 8 6				Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
54						1 1 4 8 7				Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
55						1 1 4 8 8				Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
56						1 1 4 8 9				Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya
57						1 1 4 8 10				Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
58						1 1 4 8 11				Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian
59						1 1 4 9				Beban Dibayar Dimuka
60						1 1 4 9 1				Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
61						1 1 4 9 2				Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka
62						1 1 4 9 3				Beban Barang Dibayar Dimuka
63						1 1 4 9 4				Beban Jasa Dibayar Dimuka
64						1 1 4 9 5				Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
65						1 1 4 9 6				Beban Lainnya Dibayar Dimuka
66						1 1 5 3 10				Cinderamata, Hadiyah, Trophi, Piagam, dan Sejenisnya
67						1 1 5 3 11				Bahan Buku-Buku/Tabloid/Majalah Perpustakaan
68						1 1 5 3 12				Bahan Praktek/Pelatihan
69						1 1 5 3 13				Persediaan Spanduk/Banner/Umbul-umbul
70						1 1 5 3 15				Persediaan Material/Bahan Lainnya
71	1 1 5 6	Persediaan Bahan Makanan Pokok				1 1 5 6				Persediaan Bahan Makanan/Minuman
72						1 1 5 6 2				Persediaan Bahan Makanan/Minuman Lainnya
73	1 1 5 8	Persediaan Lainnya				1 1 5 8				Persediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai
74	1 1 5 8 1	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				1 1 5 8 1				Persediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai
75	1 1 5 8 2	Persediaan Lainnya								
76	1 1 5 8 3	Persediaan Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak/Ketiga/Masyarakat								
77						1 1 5 9				Persediaan Lainnya
78						1 1 5 9 1				Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
79						1 1 5 9 2				Persediaan Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
80						1 1 5 9 5				Persediaan Barang Lainnya
81	1 3 6 1	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Perkampungan				1 3 6 1				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Perkampungan
82	1 3 6 1 1	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah KampungKonstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Kampung				1 3 6 1 1				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Kampung
83	1 3 6 1 2	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Emplasmen				1 3 6 1 2				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Emplasmen
84	1 3 6 1 3	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Kuburan				1 3 6 1 3				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Kuburan
85	1 3 6 2	Konstruksi Dalam Penggerjaan				1 3 6 2				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Pertanian
86	1 3 6 2 1	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami				1 3 6 2 1				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
87	1 3 6 2 2	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Tegalan				1 3 6 2 2				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Tegalan
88	1 3 6 2 3	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Ladang				1 3 6 2 3				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Ladang
89	1 3 6 3	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Perkebunan				1 3 6 3				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Perkebunan
90	1 3 6 4	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Keburi Campuran				1 3 6 4				Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Keburi Campuran

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
91	1 3 6 5	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Hutan	1 3 6 5	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Hutan
92	1 3 6 6	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Kolam Ikan	1 3 6 6	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Kolam Ikan
93	1 3 6 7	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Dauar/Rawa	1 3 6 7	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Dauar atau Rawa
94	1 3 6 8	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Tandus/Rusak	1 3 6 8	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Tandus/Rusak
95	1 3 6 9	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	1 3 6 9	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
96	1 3 6 10	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Pengunaan Lain	1 3 6 10	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Penggunaan Lain
97	1 3 6 11	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Untuk Bangunan Gedung	1 3 6 11	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
98	1 3 6 12	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Untuk Pertambangan	1 3 6 12	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah untuk Pertambangan
99	1 3 6 13	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah - Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1 3 6 13	Konstruksi Dalam Penggerjaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung
100	1 3 6 14	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat-Alat Besar Darat	1 3 6 14	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat-Alat Besar Darat
101	1 3 6 15	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat-Alat Besar Apung	1 3 6 15	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat-Alat Besar Apung
102	1 3 6 16	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat-alat Banitu	1 3 6 16	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat-alat Banitu
103	1 3 6 17	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor	1 3 6 17	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor
104	1 3 6 18	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 3 6 18	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
105	1 3 6 19	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Angkut Apung Bermotor	1 3 6 19	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Angkut Apung Bermotor
106	1 3 6 20	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1 3 6 20	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
107	1 3 6 21	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Angkut Bermotor Udara	1 3 6 21	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Angkut Bermotor Udara
108	1 3 6 22	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel Bermesin	1 3 6 22	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Bengkel Bermesin
109	1 3 6 23	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel Tak Bermesin	1 3 6 23	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin
110	1 3 6 24	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Ukur	1 3 6 24	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Ukur
111	1 3 6 25	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan	1 3 6 25	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Pengolahan
112	1 3 6 26	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyiram	1 3 6 26	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyiram
113	1 3 6 27	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Kantor	1 3 6 27	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Kantor
114	1 3 6 28	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga	1 3 6 28	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Rumah Tangga
115	1 3 6 29	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Komputer	1 3 6 29	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan Komputer
116	1 3 6 30	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1 3 6 30	Konstruksi Dalam Penggerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
117	1 3 6 31	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Studio	1 3 6 31	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Studio
118	1 3 6 32	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Komunikasi	1 3 6 32	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Komunikasi
119	1 3 6 33	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Peralatan Pemancar	1 3 6 33	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan Pemancar
120	1 3 6 34	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran	1 3 6 34	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Kedokteran
121	1 3 6 35	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Kesehatan	1 3 6 35	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Kesehatan
122	1 3 6 36	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Unit-Unit Laboratorium	1 3 6 36	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Unit-Unit Laboratorium
123	1 3 6 37	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Peraga/Praktik Sekolah	1 3 6 37	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Laboratorium Kimia Nuklir
124	1 3 6 38	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1 3 6 38	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
125	1 3 6 39	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1 3 6 39	Konstruksi Dalam Penggerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
126	1 3 6 40	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1 3 6 40	Konstruksi Dalam Penggerjaan Application Equipment and Non Destructive Testing Laboratory (BATA)
127			1 3 6 41	Konstruksi Dalam Penggerjaan Radialation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATA)
128			1 3 6 41	Konstruksi Dalam Penggerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Non Destructive Test (NDT) Device
129			1 3 6 41	Konstruksi Dalam Penggerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Perataan Umum Kadoteraan / Klinik Nuklir
130			1 3 6 41	Konstruksi Dalam Penggerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Perataan Hidrologi
131			1 3 6 42	Konstruksi Dalam Penggerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Perataan Lingkungan Hidup
132	1 3 6 42	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1 3 6 42	Konstruksi Dalam Penggerjaan Senjata Api
133	1 3 6 43	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1 3 6 43	Konstruksi Dalam Penggerjaan Persejataan Non Senjata Api
134	1 3 6 44	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Senjata Api	1 3 6 44	Konstruksi Dalam Penggerjaan Senjata Sinar
135	1 3 6 45	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Persenjataan Non Senjata Api	1 3 6 45	Konstruksi Dalam Penggerjaan Amunisi
136	1 3 6 46	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Amunisi	1 3 6 46	Konstruksi Dalam Penggerjaan Senjata Sinar
137	1 3 6 47	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Senjata Sinar	1 3 6 47	Konstruksi Dalam Penggerjaan Keamanan dan Perlindungan
138	1 3 6 48	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan dan Perlindungan	1 3 6 48	Konstruksi Dalam Penggerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
139	1 3 6 49	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1 3 6 49	Konstruksi Dalam Penggerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
140	1 3 6 50	Konstruksi Dalam Penggerjaan Peralatan dan Mesin - Bangunan Menara	1 3 6 50	Konstruksi Dalam Penggerjaan Bangunan Menara
141	1 3 6 51	Konstruksi Dalam Penggerjaan Bangunan Gedung dan Bangunan Menara	1 3 6 51	Konstruksi Dalam Penggerjaan Bangunan Menara

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
142	1 3 6 52	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Bersejarah	1 3 6 52	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Bersejarah
143	1 3 6 53	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu Peringatan	1 3 6 53	Konstruksi Dalam Pengerajan Tugu Peringatan
144	1 3 6 54	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Candi	1 3 6 54	Konstruksi Dalam Pengerajan Candi
145	1 3 6 55	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1 3 6 55	Konstruksi Dalam Pengerajan Monumen/Bangunan Bersejarah
146	1 3 6 56	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1 3 6 56	Konstruksi Dalam Pengerajan Tugu Titik Kontrol/Pasti
147	1 3 6 57	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Rambu-Rambu	1 3 6 57	Konstruksi Dalam Pengerajan Rambu-Rambu
148	1 3 6 58	Konstruksi Dalam Pengerajan Gedung dan Bangunan - Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1 3 6 58	Konstruksi Dalam Pengerajan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
149	1 3 6 59	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan	1 3 6 59	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan
150	1 3 6 60	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jembatan	1 3 6 60	Konstruksi Dalam Pengerajan Jembatan
151	1 3 6 61	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Irrigasi	1 3 6 61	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Air Irrigasi
152	1 3 6 62	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Pasang Surut	1 3 6 62	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Air Pasang Surut
153	1 3 6 63	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Rawa	1 3 6 63	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Air Rawa
154			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
155			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
156			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
157			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pembuang Pengaman
158			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengaman Sungai
159			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengamanan Sungai
160			1 3 6 64	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
161			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pembuang Sumber Air dan Air Tanah
162			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
163			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
164			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengembangan Sumber Air
165			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
166			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
167			1 3 6 65	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengembangan Sumber Air
168	1 3 6 66	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Bersih/Baku	1 3 6 66	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Air Bersih/Baku
169	1 3 6 66	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Waduk Air Bersih/Air Baku	1 3 6 66	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Air Kotor
170	1 3 6 67	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Kotor	1 3 6 67	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Air Kotor
171	1 3 6 68	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air	1 3 6 68	Konstruksi Dalam Pengerajan Bangunan Air
172	1 3 6 69	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Minum/Air Bersih	1 3 6 69	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Air Minum/Air Bersih
173	1 3 6 70	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Kotor	1 3 6 70	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Air Kotor
174	1 3 6 71	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengolahan Sampah	1 3 6 71	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
175	1 3 6 72	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	1 3 6 72	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
176	1 3 6 73	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pemanfaat Listrik	1 3 6 73	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Pemanfaat Listrik
177	1 3 6 74	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Gardu Listrik	1 3 6 74	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Pertahanan
178	1 3 6 75	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pertahanan	1 3 6 75	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Gas
179	1 3 6 76	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Gas	1 3 6 76	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Pengamanan
180	1 3 6 77	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengamanan	1 3 6 77	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Gas
181	1 3 6 78	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Air Minum	1 3 6 78	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Gardu Listrik
182	1 3 6 79	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Listrik	1 3 6 79	Konstruksi Dalam Pengerajan Instilasi Pertahanan
183	1 3 6 80	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Telepon	1 3 6 80	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Telepon
184	1 3 6 81	Konstruksi Dalam Pengerajan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Gas	1 3 6 81	Konstruksi Dalam Pengerajan Instalasi Gas
185	1 3 6 82	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Buku	1 3 6 82	Konstruksi Dalam Pengerajan Terbitan
186	1 3 6 83	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Terbitan	1 3 6 83	Konstruksi Dalam Pengerajan Barang-Barang Perpustakaan
187	1 3 6 84	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Barang-Barang Perpustakaan	1 3 6 84	Konstruksi Dalam Pengerajan Barang-Berakar Kebudayaan
188	1 3 6 85	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Barang-Berakar Kebudayaan	1 3 6 85	Konstruksi Dalam Pengerajan Buku

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
189	1 3 6 86	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Alat Olah Raga Lainnya	1 3 6 86	Konstruksi Dalam Pengerajan Alat Olahraga Lainnya
190	1 3 6 87	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Hewan	1 3 6 87	Konstruksi Dalam Pengerajan Hewan
191	1 3 6 88	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Tanaman	1 3 6 88	Konstruksi Dalam Pengerajan Tanaman
192	1 3 6 89	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Lainnya - Aset tetap Renovasi	1 3 6 89	Konstruksi Dalam Pengerajan Aset Tetap Renovasi
193	1 5 1 1	Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor	1 5 1 1	Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Dinas
194	1 5 1 1	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	1 5 1 1	Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Lainnya
195			1 5 1 3	Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Lainnya
196			1 5 1 3 1	Tagihan Tuntutan Pendenda/Baruan
197	1 5 2 1	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Bendahara	1 5 2 1 1	Tagihan Tuntutan Pendenda/Baruan
198	1 5 4 3	Hak Cipta	1 5 4 3 1	Hak Cipta
199	1 5 4 4	Paten	1 5 4 4 1	Paten
200			1 5 4 6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
201			1 5 4 6 1	Akumulasi Amortisasi Goodwill
202			1 5 4 6 2	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise
203			1 5 4 6 3	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
204			1 5 4 6 4	Akumulasi Amortisasi Paten
205			1 5 4 6 5	Akumulasi Amortisasi Software
206			1 5 4 6 6	Akumulasi Amortisasi Kajian
207			1 5 4 6 7	Akumulasi Amortisasi Master Plan
208	1 5 5 1 2	Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan	1 5 5 1 2	Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan/Rusak Berat
209			1 5 5 2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
210			1 5 5 2 1	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat
211	2 1 3 5	Uang PPh Ps 4	2 1 3 5	Uang PPh Ps 4 (2)
212	2 1 1 6	Uang Lainnya	2 1 1 6	Uang Perhitungan Phak Kerja Lainnya
213	2 1 1 6 3	Uang Beras (BULOG)	2 1 1 6 3	Uang Beras (BULOG)
214	2 1 3	Utang Pajak	2 1 3	Utang Beban
215	2 1 3 1	Uang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2 1 3 1	Uang Beban Pegawai
216	2 1 3 1 1	Uang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2 1 3 1 1	Uang Beban Pegawai
217	2 1 3 2	Uang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	2 1 3 2	Uang Beban Barang dan Jasa
218	2 1 3 2 1	Uang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	2 1 3 2 1	Uang Beban Barang dan Jasa
219	2 1 3 3	Uang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2 1 3 3	Uang Beban Bunga
220	2 1 3 3 1	Uang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2 1 3 4	Uang Beban Subsidi
221			2 1 3 4 1	Uang Beban Subsidi
222			2 1 3 5	Uang Beban Hibah
223			2 1 3 5 1	Uang Beban Transfer Pemerintah Pusat
224			2 1 3 6	Uang Beban Transfer Pemerintah Provinsi
225			2 1 3 6 1	Uang Beban Bantuan Sosial
226			2 1 3 7 3	Uang Beban Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota Lain
231			2 1 3 7 4	Uang Beban Transfer Pemerintah Desa
232			2 1 3 7 5	Uang Beban Transfer Bantuan Keuangan Parpol
233			2 1 3 7 6	Uang Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota
234			2 1 3 7 7	Uang Beban Transfer Lainnya
235			2 1 3 8	Uang Beban Lain-lain
236			2 1 3 8 1	Uang Beban Lain-lain
237	2 1 4 4 1	Uang Pemerintah Provinsi	2 1 4 4 1	Uang Pemerintah Provinsi
238			2 1 5 4 1	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya
239			2 1 5 4 1	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

NO	TAHUN ANGGARAN 2015				TAHUN ANGGARAN 2016			
	KODE REKENING	URAIAN			KODE REKENING	URAIAN		
240	2 2 1 3	Utang Kepada Pemerintah Pusat			2 2 1 3	Utang Pemerintah Pusat		
241	2 2 1 3 1	Utang Kepada Pemerintah Pusat			2 2 1 3 1	Utang Pemerintah Pusat		
242	2 2 1 4	Utang Kepada Pemerintah Provinsi			2 2 1 4	Utang Pemerintah Provinsi		
243	2 2 1 4 1	Utang Kepada Pemerintah Provinsi			2 2 1 4 1	Utang Pemerintah Provinsi		
244	2 2 1 5	Utang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			2 2 1 5	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
245	2 2 1 5 1	Utang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			2 2 1 5 1	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
246	2 2 1 6	Utang Kepada Pemerintah Desa			2 2 1 6	Utang Pemerintah Desa/Kampung		
247	2 2 1 6 1	Utang Kepada Pemerintah Desa			2 2 1 6 1	Utang Kepada Pemerintah Desa/Kampung		
248	4 1 1 1 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos			4 1 1 1 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos		
249	4 1 1 2 3	Café			4 1 1 2 3	Caféaria		
250					4 1 1 2 8	Jasa Boga		
251	4 1 1 3 23	Insidentil			4 1 1 3 20	Insidentil		
252	4 1 1 6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C			4 1 1 6	Pajak Parkir		
253	4 1 1 6 1	Asbes			4 1 1 6 1	Pajak Parkir		
254	4 1 1 6 2	Batu Tulis						
255	4 1 1 6 3	Batu Setengah Permata						
256	4 1 1 6 4	Batu Kapur						
257	4 1 1 6 5	Batu Apung						
258	4 1 1 6 6	Batu Gunung/Kali						
259	4 1 1 6 7	Sirtu						
260	4 1 1 6 8	Pasir						
261	4 1 1 6 9	Tanah Timbun						
262	4 1 1 6 10	Batu Pecah/Kerikil						
263	4 1 1 6 11	Batu Permata						
264	4 1 1 6 12	Bentonit						
265	4 1 1 6 13	Dolomit						
266	4 1 1 6 14	Feldspar						
267	4 1 1 6 15	Garam Batu (Halite)						
268	4 1 1 6 16	Grafit						
269	4 1 1 6 17	Granit/Andesit						
270	4 1 1 6 18	Gips						
271	4 1 1 6 19	Kalsit						
272	4 1 1 6 20	Kaolin						
273	4 1 1 6 21	Leusit						
274	4 1 1 6 22	Magnesit						
275	4 1 1 6 23	Mika						
276	4 1 1 6 24	Marmer						
277	4 1 1 6 25	Nitrat						
278	4 1 1 6 26	Opsidien						
279	4 1 1 6 27	Oker						
280	4 1 1 6 28	Pasir Kuarsa						
281	4 1 1 6 29	Perlit						
282	4 1 1 6 30	Phospat						
283	4 1 1 6 31	Talk						
284	4 1 1 6 32	Tanah Serap (Fullers earth)						
285	4 1 1 6 33	Tanah Liat						
286	4 1 1 6 34	Tawas (Alum)						
287	4 1 1 6 35	Tras						
288	4 1 1 6 36	Yarosif						
289	4 1 1 6 37	Zeolit						
290	4 1 1 6 38	Basal						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URAIAN				KODE REKENING	URAIAN			
291	4 1 1 6 39	Trakit								
292	4 1 1 6 40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya								
293	4 1 1 7	Pajak Parkir				4 1 1 7	Pajak Air Tanah			
294	4 1 1 7 1	Pajak Parkir				4 1 1 7 1	Pajak Air Tanah			
295	4 1 1 8	Pajak Air Bawah Tanah				4 1 1 8	Pajak Sarang Burung Walet			
296	4 1 1 8 1	Pajak Air Bawah Tanah				4 1 1 8 1	Pajak Sarang Burung Walet			
297	4 1 1 9	Pajak Sarang Burung Walet				4 1 1 9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
298	4 1 1 9 1	Pajak Sarang Burung Walet				4 1 1 9 1	Asbes			
299						4 1 1 9 2	Batu Tulis			
300						4 1 1 9 3	Batu Setengah Permata			
301						4 1 1 9 4	Batu Kapur			
302						4 1 1 9 5	Batu Apung			
303						4 1 1 9 6	Pasir dan Tanah Urug			
304						4 1 1 9 7	Batu Gunung/Kali			
305						4 1 1 9 8	Sirtu			
306						4 1 1 9 9	Batu Pecah/Kerikil			
307						4 1 1 9 10	Batu Permata			
308						4 1 1 9 11	Bentonit			
309						4 1 1 9 12	Dolomit			
310						4 1 1 9 13	Feldspar			
311						4 1 1 9 14	Garam Batu (Halite)			
312						4 1 1 9 15	Grafit			
313						4 1 1 9 16	Granit/Andesit			
314						4 1 1 9 17	Gips			
315						4 1 1 9 18	Kalsit			
316						4 1 1 9 19	Kaolin			
317						4 1 1 9 20	Leusit			
318						4 1 1 9 21	Magnesit			
319						4 1 1 9 22	Mika			
320						4 1 1 9 23	Marmer			
321						4 1 1 9 24	Nitrat			
322						4 1 1 9 25	Opsidien			
323						4 1 1 9 26	Oker			
324						4 1 1 9 27	Pasir Kuarsa			
325						4 1 1 9 28	Perlit			
326						4 1 1 9 29	Phospat			
327						4 1 1 9 30	Talk			
328						4 1 1 9 31	Tanah Serap (Fullers earth)			
329						4 1 1 9 32	Tanah Liat			
330						4 1 1 9 33	Tawas (Alum)			
331						4 1 1 9 34	Tras			
332						4 1 1 9 35	Yarosif			
333						4 1 1 9 36	Zeolit			
334						4 1 1 9 37	Basal			
335						4 1 1 9 38	Trakit			
336						4 1 1 9 39	Mineral Bukan Logam dan Lainnya			
337	4 1 1 10	Pajak Lingkungan				4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
338	4 1 1 10 1	Pajak Lingkungan				4 1 1 10 1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
339	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
340	4 1 1 11 1	PBB Sektor Perkotaan				4 1 1 11 1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Pemindahan Hak			
341	4 1 1 11 2	PBB Sektor Perdesaan				4 1 1 11 2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Pemindahan Hak Baru			

NO	TAHUN ANGGARAN 2015						TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN				KODE REKENING		URAIAN			
342	4	1	1	11	6	Pasir dan Tanah Urug						
343	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan						
344	4	1	1	12	1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan						
345	4	1	1	12	2	BPHTB - Pemberian Hak Baru						
346	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						
347	4	1	1	13	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						
348	4	1	2	1	2	Retribusi Pelayanan Persampahan	4	1	2	1	2	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Pembantu
349	4	1	2	1	3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu	4	1	2	1	3	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Keliling
350	4	1	2	1	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan	4	1	2	1	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Balai Pengobatan
351	4	1	2	1	5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	4	1	2	1	5	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah
352	4	1	2	1	6	Retribusi Pelayanan Pasar	4	1	2	1	6	Retribusi Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda
353	4	1	2	1	7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4	1	2	1	7	Retribusi Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi Pembuangan Sementara
354	4	1	2	1	8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemedam Kebakaran	4	1	2	1	8	Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya/lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir
355	4	1	2	1	9	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	4	1	2	1	9	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
356	4	1	2	1	10	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - KTP	4	1	2	1	10	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
357	4	1	2	1	11	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	4	1	2	1	11	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
358	4	1	2	1	12	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja	4	1	2	1	12	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
359	4	1	2	1	13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4	1	2	1	13	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran
360	4	1	2	1	14	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman	4	1	2	1	14	Retribusi Pelayanan Pasar - Los
361	4	1	2	1	15	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga	4	1	2	1	15	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
362	4	1	2	1	16	Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil	4	1	2	1	16	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang - Sedan
363	4	1	2	1	17	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	4	1	2	1	17	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang - Jeep
364	4	1	2	1	18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	4	1	2	1	18	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang - Minibus
365	4	1	2	1	19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	4	1	2	1	19	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus - Microbus
366	4	1	2	1	20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	4	1	2	1	20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus - Bus
367	4	1	2	1	21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	4	1	2	1	21	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
368	4	1	2	1	22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	4	1	2	1	22	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
369	4	1	2	1	23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	4	1	2	1	23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban - Truck
370	4	1	2	1	24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	4	1	2	1	24	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
371	4	1	2	1	25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	4	1	2	1	25	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
372	4	1	2	1	26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	4	1	2	1	26	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
373	4	1	2	1	27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	4	1	2	1	27	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
374	4	1	2	1	28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	4	1	2	1	28	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran
375	4	1	2	1	29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	4	1	2	1	29	Retribusi Alat Penyeleman Jiwa
376	4	1	2	1	30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	4	1	2	1	30	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)
377	4	1	2	1	31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	4	1	2	1	31	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto
378	4	1	2	1	32	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	4	1	2	1	32	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital
379	4	1	2	1	33	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	4	1	2	1	33	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik
380	4	1	2	1	34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	4	1	2	1	34	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
381	4	1	2	1	35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	4	1	2	1	35	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan
382	4	1	2	1	36	Retribusi Alat Penyeleman Jiwa	4	1	2	1	36	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis
383	4	1	2	1	37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)	4	1	2	1	37	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus
384	4	1	2	1	38	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto	4	1	2	1	38	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - Rumah Tangga
385	4	1	2	1	39	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital	4	1	2	1	39	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - Perkantoran
386	4	1	2	1	40	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik	4	1	2	1	40	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - Industri
387	4	1	2	1	41	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	4	1	2	1	41	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
388	4	1	2	1	42	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	4	1	2	1	42	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
389	4	1	2	1	43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	4	1	2	1	43	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - Pengujian dalam keadaan terbungkus
390	4	1	2	1	44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA						
391	4	1	2	2	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	4	1	2	2	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyeuaan Laboratorium

NO	TAHUN ANGGARAN 2015						TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN				KODE REKENING		URAIAN			
392	4	1	2	2	3	Retribusi Tempat Pelelangan	4	1	2	2	3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Ruangan/Gedung
393	4	1	2	2	4	Retribusi Terminal	4	1	2	2	4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Kendaraan Bermotor
394	4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4	1	2	2	5	Retribusi Pasar/Pertokoan - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang
395	4	1	2	2	6	Retribusi Pasa-/Pertokoan yang Dikontrakkan	4	1	2	2	6	Retribusi Pasar/Pertokoan - Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
396	4	1	2	2	7	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	4	1	2	2	7	Retribusi Pasar/Pertokoan - Fasilitas Pasar/Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah
397	4	1	2	2	8	Retribusi Rumah Potong Hewan	4	1	2	2	8	Retribusi Tempat Pelelangan - Pelelangan Ikan
398	4	1	2	2	9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4	1	2	2	9	Retribusi Tempat Pelelangan - Pelelangan Ternak
399	4	1	2	2	10	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi	4	1	2	2	10	Retribusi Tempat Pelelangan - Pelelangan Hasil Bumi
400	4	1	2	2	11	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan	4	1	2	2	11	Retribusi Tempat Pelelangan - Pelelangan Hasil Hutan
401	4	1	2	2	12	Retribusi Tempat Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan	4	1	2	2	12	Retribusi Tempat Pelelangan - Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan
402	4	1	2	2	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	4	1	2	2	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
403	4	1	2	2	14	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	4	1	2	2	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha
404	4	1	2	2	18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	4	1	2	2	18	Retribusi Rumah Potong Hewan - Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong
405	4	1	2	2	19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	4	1	2	2	19	Retribusi Rumah Potong Hewan - Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong
406	4	1	2	2	21	Retribusi Tempat Rekreasi	4	1	2	2	21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Tempat Rekreasi
407	4	1	2	2	22	Retribusi Tempat Pariwisata	4	1	2	2	22	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Tempat Pariwisata
408	4	1	2	2	23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	4	1	2	2	23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Tempat Olahraga
409	4	1	2	2	24	Retribusi Penyebrangan Orang	4	1	2	2	24	Retribusi Pelayanan Penyebrangan di Air - Penyebrangan Orang
410	4	1	2	2	25	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang	4	1	2	2	25	Retribusi Pelayanan Penyebrangan di Air - Penyebrangan Barang
411	4	1	2	2	26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4	1	2	2	26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
412	4	1	2	2	27	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga						
413	4	1	2	2	28	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Perkantoran						
414	4	1	2	2	29	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Industri						
415	4	1	2	2	30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus						
416	4	1	2	3	3	Retribusi Izin Gangguan tempat-Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi (SITU)	4	1	2	3	3	Retribusi Izin Gangguan - Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
417	4	1	2	3	4	Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota	4	1	2	3	4	Retribusi Izin Gangguan - Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
418	4	1	2	3	5	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	4	1	2	3	5	Retribusi Izin Trayek - Angkutan Kota
419	4	1	2	3	6	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	4	1	2	3	6	Retribusi Pemberian Izin Trayek - Kepada Orang Pribadi
420	4	1	2	3	7	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	4	1	2	3	7	Retribusi Pemberian Izin Trayek - Kepada Badan
421	4	1	2	3	8	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	4	1	2	3	8	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan - Kepada Orang Pribadi
422	4	1	2	3	9	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	4	1	2	3	9	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan - Kepada Badan
423	4	1	2	3	10	Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu	4	1	2	3	10	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
424	4	1	2	3	11	Retribusi Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang	4	1	2	3	11	Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu
425	4	1	2	3	12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	4	1	2	3	12	Retribusi Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang
426	4	1	3	1	2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD	4	1	3	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tulang Bawang Jaya
427	4	1	3	1	3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PT. Bank Lampung	4	1	3	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung
428	4	1	4	3	1	Rekening Deposito Pada Bank	4	1	4	3	1	Rekening Deposito Pada Bank
429	4	1	4	3	2	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	4	1	4	3	2	Pendapatan Bunga Dana Bergulir
430	4	1	4	4	1	Kerugian Uang	4	1	4	4	1	Kerugian Uang Daerah
431	4	1	4	4	2	Kerugian Barang	4	1	4	4	2	Kerugian Barang Daerah
432	4	1	4	7	6	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	4	1	4	7	6	Pendapatan Denda Pajak Parkir
433	4	1	4	7	7	Pendapatan Denda Pajak Parkir	4	1	4	7	7	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
434	4	1	4	7	8	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	4	1	4	7	8	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
435	4	1	4	7	9	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	4	1	4	7	9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
436	4	1	4	7	10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan	4	1	4	7	10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
437	4	1	4	7	11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4	1	4	7	11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
438	4	1	4	7	12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						
439	4	1	4	8	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4	1	4	8	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
440	4	1	4	8	3	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	4	1	4	8	3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN			KODE REKENING		URAIAN			
441	4	1	4	8	4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4	1	4	8	4
442	4	1	4	8	5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4	1	4	8	5
443	4	1	4	8	6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	4	1	4	8	6
444	4	1	4	8	7	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4	1	4	8	7
445	4	1	4	8	8	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4	1	4	8	8
446	4	1	4	8	9	Pendapatan Denda Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta	4	1	4	8	9
447	4	1	4	8	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4	1	4	8	10
448	4	1	4	8	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	4	1	4	8	11
449	4	1	4	8	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4	1	4	8	12
450	4	1	4	8	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan	4	1	4	8	13
451	4	1	4	8	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4	1	4	8	14
452	4	1	4	8	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4	1	4	8	15
453	4	1	4	8	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	4	1	4	8	16
454	4	1	4	8	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	4	1	4	8	17
455	4	1	4	8	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	4	1	4	8	18
456	4	1	4	8	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	4	1	4	8	19
457	4	1	4	8	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	4	1	4	8	20
458	4	1	4	8	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	4	1	4	8	21
459	4	1	4	8	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4	1	4	8	22
460	4	1	4	8	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	4	1	4	8	23
461	4	1	4	8	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air	4	1	4	8	24
462	4	1	4	8	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	4	1	4	8	25
463	4	1	4	8	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4	1	4	8	26
464	4	1	4	8	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4	1	4	8	27
465	4	1	4	8	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	4	1	4	8	28
466	4	1	4	8	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	4	1	4	8	29
467	4	1	4	8	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan	4	1	4	8	30
468	4	1	4	8	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas					
469	4	1	4	8	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					
470	4	1	4	9	3	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman					
471	4	1	4	10	8	Pendapatan Dari Hasil Audit	4	1	4	10	6
472	4	1	4	13	1	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	4	1	4	13	1
473	4	1	4	13	2	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	4	1	4	13	2
474	4	1	4	13	3	Angsuran/Cicilan Penjualan Lainnya					
475	4	1	4	15		Pendapatan Zakat	4	1	4	15	
476	4	1	4	15	1	Pendapatan Zakat	4	1	4	15	1
477	4	1	4	16		Pendapatan BLUD	4	1	4	16	
478	4	1	4	16	1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	4	1	4	16	1
479	4	1	4	16	2	Pendapatan Hibah BLUD					
480	4	1	4	16	3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD					
481	4	1	4	16	4	Pendapatan Lain-lain BLUD					
482	4	1	4	17		Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	4	1	4	17	
483	4	1	4	17	1	Pendapatan Dari Piutang	4	1	4	17	1
484						Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4	1	4	17	2
485							4	1	4	17	3
486							4	1	4	17	4
487	4	1	4	18		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4	1	4	18	
488	4	1	4	18	1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4	1	4	18	1
489							4	1	4	18	2
490	4	1	4	19		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	4	1	4	19	
491	4	1	4	19	1	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	4	1	4	19	1

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URAIAN				KODE REKENING	URAIAN			
492	4 1 4 20	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah				4 1 4 20	Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya			
493	4 1 4 20 1	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah				4 1 4 20 1	Pendapatan Dari Piutang			
494	4 1 4 20 2	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah				4 1 4 20 2	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya			
495	4 1 4 20 3	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah								
496	4 1 4 20 4	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna								
497	4 1 4 21	Hasil Penjualan Aset Lainnya								
498	4 1 4 21 1	Hasil Penjualan Aset Lainnya								
499	4 1 4 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN								
500	4 1 4 22 1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN								
501	4 1 4 23	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat								
502	4 1 4 23 1	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah								
503	4 1 4 23 2	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat								
504	4 2 1 1 2	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan				4 2 1 1 2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh21			
505	4 2 1 1 3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh21				4 2 1 1 3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan			
506	4 2 1 1 4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan				4 2 1 1 4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan			
507	4 2 1 1 5	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan								
508	4 2 1 1 6	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau								
509	4 2 1 2 2	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan				4 2 1 2 2	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan			
510	4 2 1 2 12	Bagi Hasil Cukai Tembakau				4 2 1 2 12	Bagi Hasil Cukai Tembakau			
511	4 2 3 1 20	DAK Lainnya				4 2 3 1 20	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
512	4 3 1 3 1	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta				4 3 1 3 1	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta			
513	4 3 2 1 1	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam				4 3 2 1 1	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam			
514	4 3 3 1 2	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air				4 3 3 1 2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
515	4 3 3 1 3	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				4 3 3 1 3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
516	4 3 3 1 4	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air				4 3 3 1 4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permuakaan			
517	4 3 3 1 5	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				4 3 3 1 5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok			
518	4 3 3 1 6	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah								
519	4 3 3 1 7	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permuakaan								
520	4 3 3 1 8	Bagi Hasil dari Pajak Rokok								
521	4 3 3 5	Dana Bagi hasil Lainnya								
522	4 3 3 5 1	Dana Bagi hasil Lainnya								
523	4 3 4 1 1	Tunjangan Profesi Guru PNSD				4 3 4 1 1	Bantuan Operasional Sekolah			
524	4 3 4 1 2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD				4 3 4 1 2	Dana Insentif Daerah			
525	4 3 4 1 3	Dana Insentif Daerah				4 3 4 1 3	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi			
526	4 3 4 1 4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi								
527	4 3 4 1 5	Bantuan Operasional Sekolah								
528	4 3 4 3	Dana Keistimewaan								
529	4 3 4 3 1	Dana Keistimewaan								
530	4 3 5 1 1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi				4 3 5 1 1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi			
531	4 3 5 2 1	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten....				4 3 5 2 1	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten			
532	4 3 5 3 1	Bantuan Keuangan Dari Kota.....				4 3 5 3 1	Bantuan Keuangan Dari Kota			
533	4 3 6 1 5	Pendapatan Lainnya				4 3 6 1 4	Pendapatan Lainnya			
534	4 3 8	Dana Tambahan Penghasil Guru PNSD				4 3 7	Dana Tambahan Penghasil Guru PNSD			
535	4 3 8 1	Dana Tambahan Penghasil Guru PNSD				4 3 7 1	Dana Tambahan Penghasil Guru PNSD			
536	4 3 8 1 1	Dana Tambahan Penghasil Guru PNSD				4 3 7 1 1	Dana Tambahan Penghasil Guru PNSD			
537	4 3 9	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD				4 3 8	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD			
538	4 3 9 1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD				4 3 8 1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD			
539	4 3 9 1 1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD				4 3 8 1 1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD			
540	4 3 11	Bantuan Biaya Pemungutan PBB				4 3 9	Bantuan Biaya Pemungutan PBB			
541	4 3 11 1	Bantuan Biaya Pemungutan PBB				4 3 9 1	Bantuan Biaya Pemungutan PBB			
542	4 3 11 1 1	Bantuan Biaya Pemungutan PBB				4 3 9 1 1	Bantuan Biaya Pemungutan PBB			

NO	TAHUN ANGGARAN 2015				TAHUN ANGGARAN 2016			
	KODE REKENING	URAIAN			KODE REKENING	URAIAN		
543	4 3 12	Dana Desa			4 3 10	Dana Desa/Kampung		
544	4 3 12 1	Dana Desa			4 3 10 1	Dana Desa/Kampung		
545	4 3 12 1 1	Dana Desa			4 3 10 1 1	Dana Desa/Kampung		
546					4 3 11	Dana Insensif Daerah		
547					4 3 11 1	Dana Insentif Daerah		
548					4 3 11 1 1	Dana Insentif Daerah		
549	4 3 15	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - Lainnya			4 3 12	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lainnya		
550	4 3 15 5	Pendapatan Yang Sah Lainnya			4 3 12 1	Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya		
551	4 3 15 5 1	Pendapatan Yang Sah Lainnya			4 3 12 1 1	Pendapatan Zakat		
552					4 3 12 1 5	Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya		
553					5 1 1 1 24	Uang Makan		
554	5 1 1 2 8	Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah			5 1 1 2 6	Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah		
555	5 1 1 3 1	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD			5 1 1 3 1	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD		
556	5 1 1 3 2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH			5 1 1 3 2	Biaya Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati		
557	5 1 1 3 4	Tunjangan Badan Legislasi			5 1 1 3 3	Tunjangan Badan Legislasi		
558	5 1 1 4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah			5 1 1 4	Biaya Pemungutan Pajak		
559	5 1 1 4 1	Biaya Pemungutan PBB			5 1 1 4 1	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan		
560	5 1 1 4 3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan						
561	5 1 1 4 4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan						
562	5 1 1 4 5	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan						
563	5 1 1 4 6	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan						
564	5 1 1 5 2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor						
565	5 1 1 5 3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor						
566	5 1 1 5 4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
567	5 1 1 5 5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan						
568	5 1 1 5 6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok						
569	5 1 1 5 7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel						
570	5 1 1 5 8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran						
571	5 1 1 5 9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan						
572	5 1 1 5 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame						
573	5 1 1 5 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan						
574	5 1 1 5 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir						
575	5 1 1 5 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah						
576	5 1 1 5 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet						
577	5 1 1 5 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
578	5 1 1 5 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan						
579	5 1 1 5 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						
580	5 1 1 6 2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan						
581	5 1 1 6 3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan						
582	5 1 1 6 4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil						
583	5 1 1 6 5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat						
584	5 1 1 6 6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						
585	5 1 1 6 7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar						
586	5 1 1 6 8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor						
587	5 1 1 6 9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran						
588	5 1 1 6 10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta						
589	5 1 1 6 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus						
590	5 1 1 6 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair						
591	5 1 1 6 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang						
592	5 1 1 6 14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015						TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN				KODE REKENING		URAIAN			
593	5	1	1	6	15	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi						
594	5	1	1	6	16	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah						
595	5	1	1	6	17	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan						
596	5	1	1	6	18	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan						
597	5	1	1	6	19	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal						
598	5	1	1	6	20	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir						
599	5	1	1	6	21	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa						
600	5	1	1	6	22	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan						
601	5	1	1	6	23	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan						
602	5	1	1	6	24	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga						
603	5	1	1	6	25	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air						
604	5	1	1	6	26	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Perjaluan Produksi Usaha Daerah						
605	5	1	1	6	27	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan						
606	5	1	1	6	28	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol						
607	5	1	1	6	29	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan						
608	5	1	1	6	30	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek						
609	5	1	1	6	31	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan						
610	5	1	1	6	32	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas						
611	5	1	1	6	33	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)						
612	5	1	2	2	1	Bunga Utang Obligasi	5	1	2	2	1	Bunga Utang Obligasi
613	5	1	3	1	1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	5	1	3	1	1	Belanja Subsidi Kepada PDAM
614	5	1	4	2	3	Hibah kepada Pemerintah Kota	5	1	4	2	3	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Lainnya
615	5	1	4	3		Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa	5	1	4	3		Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung
616	5	1	4	3	1	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa....	5	1	4	3	1	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung
617	5	1	4	4	1	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah	5	1	4	4	1	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
618	5	1	4	4	2	Belanja Hibah kepada BUMD						
619	5	1	4	5	1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	5	1	4	5	1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
620	5	1	5	2		Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	5	1	5	2		Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
621	5	1	5	2	1	Belanja Bantuan Sosial Kepada	5	1	5	2	1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
622	5	1	5	3		Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5	1	5	3		Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
623	5	1	5	3	1	Belanja Bantuan Sosial Kepada	5	1	5	3	1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat .
624	5	1	5	4		Belanja Bantuan Kepada Partai Politik						
625	5	1	5	4	1	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.....						
626	5	1	6			Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5	1	6			Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa / Kampung
627	5	1	6	1	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	5	1	6	1	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
628	5	1	6	2	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	5	1	6	2	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
629	5	1	6	3		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5	1	6	3		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa / Kampung
630	5	1	6	3	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5	1	6	3	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa / Kampung
631	5	1	6	4	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	5	1	6	4	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
632	5	1	6	5		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5	1	6	5		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa / Kampung
633	5	1	6	5	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5	1	6	5	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa / Kampung
634	5	1	7			Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5	1	7			Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa / Kampung
635	5	1	7	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	5	1	7	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
636	5	1	7	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota...	5	1	7	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
637	5	1	7	3		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5	1	7	3		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kampung
638	5	1	7	3	1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	5	1	7	3	1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kampung
639	5	1	7	4		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	5	1	7	4		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kampung lainnya
640	5	1	7	4	3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	5	1	7	4	3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kampung
641	5	1	7	5		Belanja Bantuan Kepada Partai Politik						
642	5	1	7	5	1	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik						
643	5	1	7	6		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URAIAN				KODE REKENING	URAIAN			
644	5 1 7 6 1	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota								
645	5 1 8 1 2	Belanja Tak Terduga Bencana Alam								
646	5 1 8 1 3	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya								
647	5 1 9 1 2	Belanja Tak Terduga Bencana Alam								
648	5 1 9 1 3	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya								
649	5 2 1 1 5	Honorarium Pelaksana Kegiatan				5 2 1 1 4	Honorarium Pelaksana Kegiatan			
650	5 2 1 2 2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				5 2 1 2 1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			
651	5 2 1 2 3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5 2 1 2 2	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
652	5 2 1 2 4	Honorarium Pelaksana Kegiatan				5 2 1 2 3	Honorarium Pelaksana Kegiatan			
653	5 2 1 4	Honorarium Pengelola Dana BOS				5 2 1 4	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit			
654	5 2 1 4 1	Honorarium Pengelola Dana BOS				5 2 1 4 1	Belanja Pegawai BLUD			
655						5 2 1 4 2	Belanja Pelayanan BLUD			
656	5 2 1 5									
657	5 2 1 6									
658	5 2 1 7	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit								
659	5 2 1 7 1	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit								
660						5 2 2 2 13	Belanja Materi Promosi			
661	5 2 2 3 24	Belanja TV Berlangganan				5 2 2 3 23	Belanja TV Berlangganan			
662	5 2 2 3 25	Belanja Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul				5 2 2 3 24	Belanja Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul			
663	5 2 2 3 26	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS)								
664	5 2 2 3 27	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (Non PNS)								
665	5 2 2 3 28	Belanja Jasa Kantor Lainnya								
666	5 2 2 4	Belanja Premi Asuransi				5 2 2 4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
667	5 2 2 4 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				5 2 2 4 1	Belanja Jasa Service			
668	5 2 2 4 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				5 2 2 4 2	Belanja Penggantian Suku Cadang			
669	5 2 2 4 3	Belanja Asuransi Kecelakaan				5 2 2 4 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			
670						5 2 2 4 4	Belanja Jasa KIR			
671						5 2 2 4 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor			
672	5 2 2 5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				5 2 2 5	Belanja Cetak dan Penggandaan			
673	5 2 2 5 1	Belanja Jasa Service				5 2 2 5 1	Belanja Cetak			
674	5 2 2 5 2	Belanja Penggantian Suku Cadang				5 2 2 5 2	Belanja Penggandaan			
675	5 2 2 5 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				5 2 2 5 3	Belanja Fotocopy			
676	5 2 2 5 4	Belanja Jasa KIR								
677	5 2 2 5 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor								
678	5 2 2 5 6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor								
679	5 2 2 5 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan								
680	5 2 2 5 8	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi								
681	5 2 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan				5 2 2 6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
682	5 2 2 6 1	Belanja Cetak				5 2 2 6 1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas			
683	5 2 2 6 2	Belanja Penggandaan				5 2 2 6 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			
684	5 2 2 6 3	Belanja Fotocopy				5 2 2 6 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			
685	5 2 2 7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5 2 2 7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
686	5 2 2 7 1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas				5 2 2 7 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
687	5 2 2 7 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5 2 2 7 2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air			
688	5 2 2 7 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				5 2 2 7 3	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara			
689	5 2 2 7 4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas								
690	5 2 2 7 5	Belanja Sewa Lahan								
691	5 2 2 7 6	Belanja Sewa Lapangan								
692	5 2 2 8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				5 2 2 8	Belanja Sewa Alat Berat			
693	5 2 2 8 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				5 2 2 8 1	Belanja Sewa Eskavator			
694	5 2 2 8 2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				5 2 2 8 2	Belanja Sewa Buldoser			

NO	TAHUN ANGGARAN 2015				TAHUN ANGGARAN 2016			
	KODE REKENING	URAIAN			KODE REKENING	URAIAN		
695	5 2 2 8 3	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara			5 2 2 8 3	Belanja Sewa Dump Truck		
696					5 2 2 8 4	Belanja Sewa Crane		
697					5 2 2 8 5	Belanja Sewa Kendaraan Penyapu Jalan		
698					5 2 2 8 6	Belanja Sewa Stoom Wals		
699					5 2 2 8 7	Belanja Sewa Mesin Gilas		
700	5 2 2 9	Belanja Sewa Alat Berat			5 2 2 9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
701	5 2 2 9 1	Belanja Sewa Eskavator			5 2 2 9 1	Belanja Sewa Meja Kursi		
702	5 2 2 9 2	Belanja Sewa Buldoser			5 2 2 9 2	Belanja Sewa Komputer Dan Printer		
703	5 2 2 9 3	Belanja Sewa Dump Truck			5 2 2 9 3	Belanja Sewa Projektor		
704	5 2 2 9 4	Belanja Sewa Crane			5 2 2 9 4	Belanja Sewa Generator		
705	5 2 2 9 5	Belanja Sewa Kendaraan Penyapu Jalan			5 2 2 9 5	Belanja Sewa Tenda		
706	5 2 2 9 6	Belanja Sewa Stoom Wals			5 2 2 9 6	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional		
707	5 2 2 9 7	Belanja Sewa Mesin Gilas			5 2 2 9 7	Belanja Sewa Sound System		
708					5 2 2 9 8	Belanja Sewa Lampu dan Alat-alat Listrik		
709					5 2 2 9 9	Belanja Sewa Alat-alat Olahraga		
710					5 2 2 9 10	Belanja Sewa AC		
711					5 2 2 9 11	Belanja Sewa Karpet / Rumbai /Taplak		
712					5 2 2 9 12	Belanja Sewa Pengharum Ruangan		
713					5 2 2 9 13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya		
714	5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			5 2 2 10	Belanja Makanan dan Minuman		
715	5 2 2 10 1	Belanja Sewa Meja Kursi			5 2 2 10 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai		
716	5 2 2 10 2	Belanja Sewa Komputer Dan Printer			5 2 2 10 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
717	5 2 2 10 3	Belanja Sewa Projektor			5 2 2 10 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu		
718	5 2 2 10 4	Belanja Sewa Generator			5 2 2 10 4	Belanja makanan dan Minum Pasien		
719	5 2 2 10 5	Belanja Sewa Tenda			5 2 2 10 5	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan		
720	5 2 2 10 6	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional						
721	5 2 2 10 7	Belanja Sewa Sound System						
722	5 2 2 10 8	Belanja Sewa Lampu dan Alat-alat Listrik						
723	5 2 2 10 9	Belanja Sewa Alat-alat Olahraga						
724	5 2 2 10 10	Belanja Sewa AC						
725	5 2 2 10 11	Belanja Sewa Karpet / Rumbai /Taplak						
726	5 2 2 10 12	Belanja Sewa Pengharum Ruangan						
727	5 2 2 10 13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya						
728	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman			5 2 2 11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
729	5 2 2 11 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai			5 2 2 11 1	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH		
730	5 2 2 11 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			5 2 2 11 2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)		
731	5 2 2 11 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu			5 2 2 11 3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
732	5 2 2 11 4	Belanja makanan dan Minum Pasien			5 2 2 11 4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		
733	5 2 2 11 5	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan			5 2 2 11 5	Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)		
734					5 2 2 11 6	Belanja Pakalan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan		
735					5 2 2 11 7	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PsR)		
736					5 2 2 11 8	Belanja Atribut Pakaian Dinas		
737	5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			5 2 2 12	Belanja Pakaian Kerja		
738	5 2 2 12 1	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH			5 2 2 12 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan		
739	5 2 2 12 2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)						
740	5 2 2 12 3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)						
741	5 2 2 12 4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)						
742	5 2 2 12 5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)						
743	5 2 2 12 6	Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan						
744	5 2 2 12 7	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PsR)						
745	5 2 2 12 8	Belanja Atribut Pakaian Dinas						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015				TAHUN ANGGARAN 2016			
	KODE REKENING	URAIAN			KODE REKENING	URAIAN		
746	5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja			5 2 2 13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		
747	5 2 2 13 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan			5 2 2 13 1	Belanja Pakaian KORPRI		
748					5 2 2 13 2	Belanja Pakaian Adat Daerah		
749					5 2 2 13 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional		
750					5 2 2 13 4	Belanja Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya		
751					5 2 2 13 5	Belanja Pakaian Terima Tamu Pemda		
752					5 2 2 13 6	Belanja Pakaian Dharma Wanita		
753					5 2 2 13 7	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Lainnya		
754	5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu			5 2 2 14	Belanja Perjalanan Dinas		
755	5 2 2 14 1	Belanja Pakaian KORPRI			5 2 2 14 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
756	5 2 2 14 2	Belanja Pakaian Adat Daerah			5 2 2 14 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
757	5 2 2 14 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional			5 2 2 14 3	Belanja perjalanan dinas luar negeri		
758	5 2 2 14 4	Belanja Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya			5 2 2 14 4	Belanja Transport Lokal/Uang Saku		
759	5 2 2 14 5	Belanja Pakaian Terima Tamu Pemda						
760	5 2 2 14 6	Belanja Pakaian Dharma Wanita						
761	5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas			5 2 2 15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (Tugas Belajar Pemda)		
762	5 2 2 15 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			5 2 2 15 1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
763	5 2 2 15 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			5 2 2 15 2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1		
764	5 2 2 15 3	Belanja perjalanan dinas luar negeri			5 2 2 15 3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		
765	5 2 2 15 4	Belanja Transport Lokal/Uang Saku			5 2 2 15 4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3		
766	5 2 2 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			5 2 2 16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS		
767	5 2 2 16 1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3			5 2 2 16 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		
768	5 2 2 16 2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			5 2 2 16 2	Belanja Sosialisasi		
769	5 2 2 16 3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			5 2 2 16 3	Belanja Bimbingan Teknis		
770	5 2 2 16 4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3						
771	5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS			5 2 2 17	Belanja Pemeliharaan		
772	5 2 2 17 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan			5 2 2 17 1	Belanja Pemeliharaan Jalan		
773	5 2 2 17 2	Belanja Sosialisasi			5 2 2 17 2	Belanja Pemeliharaan Jembatan		
774	5 2 2 17 3	Belanja Bimbingan Teknis			5 2 2 17 3	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		
775					5 2 2 17 4	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor		
776					5 2 2 17 5	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga		
777					5 2 2 17 6	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Laboratorium		
778					5 2 2 17 7	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat		
779					5 2 2 17 8	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi		
780					5 2 2 17 9	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Uji Tekhnis		
781					5 2 2 17 10	Biaya Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon		
782					5 2 2 17 11	Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Lalu Lintas		
783					5 2 2 17 12	Biaya Pemeliharaan Peralatan Perbangkelan		
784					5 2 2 17 13	Biaya Pemeliharaan Bangunan Irigasi, Saluran Air dan Jaringan		
785					5 2 2 17 14	Biaya Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah		
786					5 2 2 17 15	Biaya Pemeliharaan Kolam Ikan/Pembenihan		
787					5 2 2 17 16	Biaya Pemeliharaan Tempat Pemasangan Reklame/Baliho/Spanduk		
788					5 2 2 17 17	Belanja Pemeliharaan Taman		
789					5 2 2 17 18	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Olahraga		
790					5 2 2 17 19	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		
791					5 2 2 17 20	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
792	5 2 2 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas			5 2 2 18	Belanja Jasa Konsultansi		
793	5 2 2 18 1	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah			5 2 2 18 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian		
794	5 2 2 18 2	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah			5 2 2 18 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		
795					5 2 2 18 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		
796					5 2 2 18 4	Belanja Jasa Konsultasi Kesehatan		

NO	TAHUN ANGGARAN 2015				TAHUN ANGGARAN 2016			
	KODE REKENING	URAIAN			KODE REKENING	URAIAN		
797					5 2 2 18 5	Belanja Jasa Konsultasi Managemen		
798					5 2 2 18 6	Belanja Jasa Konsultasi Pendampingan		
799					5 2 2 18 7	Belanja Jasa Konsultasi Hukum		
800	5 2 2 19	Belanja Pemulangan Pegawai			5 2 2 19	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
801	5 2 2 19 1	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiu Dalam Daerah			5 2 2 19 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		
802	5 2 2 19 2	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiu Luar Daerah			5 2 2 19 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		
803	5 2 2 19 3	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas						
804	5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan			5 2 2 20	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
805	5 2 2 20 1	Belanja Pemeliharaan Jalan			5 2 2 20 1	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat		
806	5 2 2 20 2	Belanja Pemeliharaan Jembatan			5 2 2 20 2	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga		
807	5 2 2 20 3	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor						
808	5 2 2 20 4	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor						
809	5 2 2 20 5	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga						
810	5 2 2 20 6	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Laboratorium						
811	5 2 2 20 7	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat						
812	5 2 2 20 8	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi						
813	5 2 2 20 9	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Uji Tekhnis						
814	5 2 2 20 10	Biaya Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon						
815	5 2 2 20 11	Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Lalu Lintas						
816	5 2 2 20 12	Biaya Pemeliharaan Peralatan Perbengkelan						
817	5 2 2 20 13	Biaya Pemeliharaan Bangunan Irigasi, Saluran Air dan Jaringan						
818	5 2 2 20 14	Biaya Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah						
819	5 2 2 20 15	Biaya Pemeliharaan Kolam Ikan/Pembenihan						
820	5 2 2 20 16	Biaya Pemeliharaan Tempat Pemasangan Reklame/Baliho/Spanduk						
821	5 2 2 20 17	Belanja Pemeliharaan Taman						
822	5 2 2 20 18	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Olahraga						
823	5 2 2 20 19	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum						
824	5 2 2 20 20	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
825	5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi			5 2 2 21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS (Khusus DPRD)		
826	5 2 2 21 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian			5 2 2 21 1	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Workshop (Khusus DPRD)		
827	5 2 2 21 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan						
828	5 2 2 21 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan						
829	5 2 2 21 4	Belanja Jasa Konsultasi Kesehatan						
830	5 2 2 21 5	Belanja Jasa Konsultasi Managemen						
831	5 2 2 21 6	Belanja Jasa Konsultasi Pendampingan						
832	5 2 2 21 7	Belanja Jasa Konsultasi Hukum						
833	5 2 2 22	Belanja Barang Dana BOS			5 2 2 22	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Buruh Non Pegawai		
834	5 2 2 22 1	Belanja Barang Dana BOS			5 2 2 22 1	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Buruh Non Pegawai		
835	5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			5 2 2 23	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit		
836	5 2 2 23 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			5 2 2 23 1	Belanja Barang / Bahan / Material BLUD		
837	5 2 2 23 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			5 2 2 23 2	Belanja Pemeliharaan BLUD		
838					5 2 2 23 3	Belanja Jasa BLUD		
839	5 2 2 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			5 2 2 24	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli		
840	5 2 2 24 1	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat			5 2 2 24 1	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS)		
841	5 2 2 24 2	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga			5 2 2 24 2	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (Non PNS)		
842	5 2 2 25	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS						
843	5 2 2 25 1	Belanja Beasiswa Pendidikan Dasar						
844	5 2 2 25 2	Belanja Beasiswa Pendidikan Menengah						
845	5 2 2 25 3	Belanja Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi						
846	5 2 2 26	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS						
847	5 2 2 26 1	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Workshop						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URAIAN				KODE REKENING	URAIAN			
848	5 2 2 27	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Buruh Non Pegawai								
849	5 2 2 27 1	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Buruh Non Pegawai								
850	5 2 2 28	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit								
851	5 2 2 28 1	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit								
852	6 1 1 5 1	Uang Jaminan				6 1 1 5 1	Uang Jaminan			
853	6 1 1 6 2	Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang T.A 2011				6 1 1 6 2	Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang			
854	6 1 1 12	Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus								
855	6 1 1 12 1	Dana Otonomi Khusus Aceh								
856	6 1 1 12 2	Dana Otonomi Khusus Papua								
857	6 1 1 12 3	Dana Otonomi Khusus Papua Barat								
858	6 1 1 13	Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur								
859	6 1 1 13 1	Dana Tambahan Infrastruktur Papua								
860	6 1 1 13 2	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat								
861	6 1 2 1 1	Pencairan Dana Cadangan Nomor				6 1 2 1 1	Pencairan Dana Cadangan			
862	6 1 3 1 1	BUMD				6 1 3 1 1	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
863	6 1 3 2 1	Hasil Penjualan Aset				6 1 3 2 1	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga			
864	6 1 4 1 1	Penerusan Pinjaman				6 1 4 1 1	Penerusan Pinjaman			
865	6 1 4 3 1	Bank				6 1 4 3 1	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Bank			
866	6 1 4 4 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank				6 1 4 4 1	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
867	6 1 4 5 1	Obligasi Atas Nama				6 1 4 5 1	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah			
868	6 1 6 3 1	Pemerintah Daerah				6 1 6 3 1	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah			
869	6 1 6 4 1	Bank				6 1 6 4 1	Penerimaan Piutang Daerah Dari Bank			
870	6 1 6 5 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank				6 1 6 5 1	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
871	6 2 1 1 1	Pembentukan Dana Cadangan Nomor				6 2 1 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			
872	6 2 2 1	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)				6 2 2 1	Penyerahan Modal Kepada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)			
873	6 2 2 1 1	BUMN				6 2 2 1 1	Penyerahan Modal Kepada BUMN			
874	6 2 2 2	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				6 2 2 2	Penyerahan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)			
875	6 2 2 2 1	Penyerahan Modal pada Bank				6 2 2 2 1	Penyerahan Modal Kepada BUMD			
876						6 2 2 2 2	Penyerahan Modal Kepada Bank			
877	6 2 2 3	Badan Usaha Milik Swasta				6 2 2 3	Penyerahan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta			
878	6 2 2 3 1	Badan Usaha Milik Swasta -				6 2 2 3 1	Penyerahan Modal Kepada Badan / Lembaga Swasta			
879	6 2 3 1 1	Penerusan Pinjaman				6 2 3 1 1	Penerusan Pinjaman			
880	6 2 3 3 1	Bank BPD Simulasi				6 2 3 3 1	Bank			
881	6 2 3 4 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank				6 2 3 4 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank			
882	6 2 3 5 1	Penerusan Pinjaman				6 2 3 5 1	Penerusan Pinjaman			
883	6 2 3 6 1	Pemerintah Daerah				6 2 3 6 1	Pemerintah Daerah			
884	6 2 3 8 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank				6 2 3 8 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank			
885	6 2 3 9 1	Obligasi Atas Nama				6 2 3 9 1	Obligasi			
886	6 2 3 10 1	Obligasi Atas Nama				6 2 3 10 1	Obligasi			
887	6 2 4 1 1	Pemberian Pinjaman				6 2 4 1 1	Pemerintah			
888	6 2 4 2 1	Pemerintah Daerah				6 2 4 2 1	Pemerintah Daerah			
889						7 1 1 2 2	Penerimaan PFK - JKK			
890						7 1 1 2 3	Penerimaan PFK - JKM			
891	7 1 1 3	Penerimaan PFK - Askes (BPJS)				7 1 1 3	Penerimaan PFK - Iuran Askes / BPJS			
892						7 2 1 2 2	Pengeluaran PFK - JKK			
893						7 2 1 2 3	Pengeluaran PFK - JKM			
894	7 2 1 3	Pengeluaran PFK - Askes (BPJS)				7 2 1 3	Pengeluaran PFK - Iuran Askes / BPJS			



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**TABEL 2
PERUBAHAN AKUN REKENING AKRUAL PADA TAHUN 2016**

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URAIAN				KODE REKENING	URAIAN			
1	1 1 1 4 1	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD				1 1 1 4 1	Kas Di Bendahara BLUD			
2	1 1 1 4 2	Kas Di Bendahara Penerimaan BLUD				1 1 1 4 2	Kas Di Bendahara BLUD - Bank			
3	1 1 2 2 1	Deposito pada				1 1 2 2 1	Deposito pada.....			
4	1 1 3 2	Piutang Retribusi				1 1 3 2	Piutang Retribusi Daerah			
5	1 1 3 2 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan				1 1 3 2 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
6	1 1 3 2 20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa				1 1 3 2 20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa			
7	1 1 3 2 23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga				1 1 3 2 23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
8	1 1 3 3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				1 1 3 3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
9	1 1 3 3 2	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN				1 1 3 3 2	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Lainnya			
10	1 1 3 3 3	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				1 1 3 3 3	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN			
11						1 1 3 3 4	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
12	1 1 3 4 3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah								
13	1 1 3 4 11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan								
14	1 1 3 4 14	Piutang BLUD								
15	1 1 3 4 20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya				1 1 3 4 20	Piutang Pendapatan Sekolah dan Diklat			
16	1 1 3 4 21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN								
17	1 1 3 4 22	Piutang Pendapatan Sekolah dan Diklat				1 1 3 4 22	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya			
18	1 1 3 6	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya				1 1 3 6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
19	1 1 3 8 1	Piutang Pendapatan Lainnya....				1 1 3 8 1	Piutang Pendapatan Lainnya....			
20	1 1 4 3 1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III				1 1 4 3 1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas			
21	1 1 4 3 2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas				1 1 4 3 2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Dinas			
22	1 1 4 4	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				1 1 4 4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
23	1 1 4 4 1	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara				1 1 4 4 1	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan			
24	1 1 4 4 2	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara				1 1 4 4 2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Negeri Bukan Bendahara			
25	1 1 4 5	Uang Muka				1 1 4 5	Uang Muka Operasional			
26	1 1 4 5 1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa				1 1 4 5 1	Uang Muka Operasional			
27	1 1 5 1 2	Penyisihan Piutang Retribusi				1 1 5 1 2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah			
28	1 1 5 1 3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				1 1 5 1 3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
29	1 1 5 1 4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				1 1 5 1 4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah			
30	1 1 5 1 5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				1 1 5 1 5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
31	1 1 5 2 4	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian				1 1 5 2 4	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian			
32						1 1 7 1 11	Persediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai			
33	1 1 7 2 4	Persediaan Bahan obat-obatan				1 1 7 2 4	Persediaan Obat-obatan			
34						1 1 7 2 8	Persediaan Bahan Pakan Ternak			
35						1 1 7 2 9	Cinderata Mata, Hadiah, Trophi, Piagam, dan Sejenisnya			
36						1 1 7 2 10	Bahan Buku-Buku/Tabloid/Majalah Perpustakaan			
37						1 1 7 2 11	Bahan Praktek/Pelatihan			
38						1 1 7 2 12	Persediaan Bahan Makanan/Minuman Lainnya			
39						1 1 7 2 13	Persediaan Spanduk/Banner/Umbul-umbul			
40						1 1 7 2 15	Persediaan Material/Bahan Lainnya			
41						1 1 7 3 2	Persediaan Barang Lainnya			
42						1 1 7 3 3	Persediaan Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			
43	1 2 2 2 1	Investasi Perniagaan Lainnya				1 2 2 2 1	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan			
44						1 2 2 2 2	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan			
45						1 2 2 2 4	Investasi Permanen Lainnya - Lainnya			

NO	TAHUN ANGGARAN 2015						TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN				KODE REKENING		URAIAN			
46							1	3	1	6	5	Kolam Lainnya
47	1	3	2	24	15	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	1	3	2	24	15	Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah
48							1	3	4	21	3	Instalasi Listrik
49							1	3	4	22	4	Jaringan Telepon
50	1	3	6	90	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi							
51	1	5	1	1	1	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	1	5	1	1	1	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas
52	1	5	1	1	2	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	1	5	1	1	2	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Dinas
53							1	5	1	1	3	Tagihan Angsuran Penjualan Lainnya
54	1	5	3	2	Lisensi dan franchise		1	5	3	2		Lisensi dan Frenchise
55	1	5	3	5	Aset Tidak Berwujud Lainnya		1	5	3	5		Aset Tidak Berwujud Lainnya
56	1	5	3	6	5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	1	5	3	6	5	Akumulasi Amortisasi Software
57							1	5	3	6	6	Akumulasi Amortisasi Kajian
58							1	5	3	6	7	Akumulasi Amortisasi Master Plan
59	1	5	4		Aset Lain-lain		1	5	4			Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
60	1	5	4	1	Aset Lain-lain		1	5	4	1		Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
61	1	5	4	1	1	Aset Lain-lain.....	1	5	4	1	1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
62							1	5	4	1	2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Bukan Bendahara
63	1	5	4	2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain							
64	1	5	4	2	1	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	1	5	5			Aset Lain-lain
65							1	5	5	1		Aset Lain-lain
66							1	5	5	1	1	Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Akan Diserahkan/Dihibahkan
67							1	5	5	1	2	Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan/Rusak Berat
68							1	5	5	1	3	Aset Lain-Lain - Lainnya
69							1	5	5	2		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
70							1	5	5	2	1	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat
71							2	1	1	1	2	Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)
72							2	1	1	1	3	Utang Jaminan Kematian (JKM)
73							2	1	1	2	2	Utang Iuran Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)
74							2	1	1	2	3	Utang Iuran Jaminan Kematian (JKM)
75							2	1	1	4		Utang PPN Pusat
76	2	1	1	4	Utang PPN Pusat		2	1	2	3	3	Dst.....
77							2	1	5	7	3	Utang Beban Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota Lain
78	2	1	5	7	3	Utang Beban Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota	2	1	5	7	7	Utang Beban Transfer Lainnya
79							2	1	6	6	1	Utang Pembiayaan
80							2	2	1	5	1	Utang Kepada Pemerintah Provinsi
81	2	2	1	5	1	Utang Kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	2	2	1	5	3	Utang Kepada Pemerintah Desa/Kampung
82	2	2	1	5	3	Utang Kepada Pemerintah Desa	4	1	2	1	1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA
83	4	1	2	1	1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	4	1	2	1	2	Puskesmas Keliling - LRA
84	4	1	2	1	2	Puskesmas keliling - LRA	4	1	2	1	3	Puskesmas Pembantu - LRA
85	4	1	2	1	3	Puskesmas pembantu - LRA	4	1	2	15	3	Ruangan/Gedung - LRA
86	4	1	2	15	3	Ruang -LRA	4	1	2	29	3	Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota - LRA
87							4	1	3	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tulang Bawang Jaya - LRA
88	4	1	3	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	4	1	3	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung - LRA
89							4	1	3	2	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA
90	4	1	3	2	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA	4	1	3	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta - LRA
91	4	1	3	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA	4	1	4	5	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA
92	4	1	4	5	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	4	1	4	5	2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA
93	4	1	4	5	2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA	4	1	4	12	1	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LRA
94	4	1	4	12	1	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA	4	1	4	17	1	Pendapatan Zakat - LRA
95	4	1	4	17	1	Pendapatan Zakat - LRA	4	1	4	19		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA
96	4	1	4	19		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA						

NO	TAHUN ANGGARAN 2015						TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN				KODE REKENING		URAIAN			
97	4 1 4 19 1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA					4 1 4 19 1		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat - LRA			
98	4 1 4 22 1	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA					4 1 4 22 1		Pendapatan dari Piutang - LRA			
99							4 1 4 22 2		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya			
100							4 1 4 23 2		Pendapatan Penyelenggara Diklat			
101							4 2 1 1 7		Bagi Hasil dari Bantuan Biaya Pemungutan PBB - LRA			
102	4 2 1 4 20	DAK Bidang Lainnya					4 2 1 4 20		DAK bidang Lainnya			
103	4 2 2 3 6	Dana Desa - LRA					4 2 2 3 6		Dana Desa/Kampung - LRA			
104	4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA					4 2 4 1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA			
105	4 3 3 1	Pendapatan Lainnya - LRA					4 3 3 1		Pendapatan Pelayanan Kesehatan - LRA			
106	4 3 3 1 5	Pendapatan Piutang BPJS BLUD - LRA					4 3 3 1 5		Pendapatan Pelayanan Kesehatan Lainnya - LRA			
107							4 3 4		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LRA			
108							4 3 4 1		Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LRA			
109							4 3 4 1 5		Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya			
110	5 1 1 1 20	Belanja Tunjangan Khusus Bulanan/Operasional					5 1 1 1 20		Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD			
111							5 1 1 1 24		Belanja Uang Makan			
112	5 1 1 4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan					5 1 1 4		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah			
113	5 1 1 4 1	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan					5 1 1 4 1		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan			
114	5 1 1 4 2	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan					5 1 1 4 2		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah			
115	5 1 1 4 3	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan					5 1 1 4 3		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan			
116	5 1 1 4 4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan					5 1 1 4 4		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan			
117	5 1 1 4 5	Belanja Biaya Pemungutan PBB					5 1 1 4 5		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kehutanan			
118							5 1 1 4 6		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan			
119	5 1 1 5 1	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA					5 1 1 5 1		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor			
120	5 1 1 5 2	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA					5 1 1 5 2		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
121	5 1 1 5 3	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA					5 1 1 5 3		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
122	5 1 1 5 4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA					5 1 1 5 4		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan			
123	5 1 1 5 5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA					5 1 1 5 5		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok			
124	5 1 1 5 6	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA					5 1 1 5 6		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel			
125	5 1 1 5 7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA					5 1 1 5 7		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran			
126	5 1 1 5 8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA					5 1 1 5 8		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan			
127	5 1 1 5 9	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA					5 1 1 5 9		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame			
128	5 1 1 5 10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA					5 1 1 5 10		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan			
129	5 1 1 5 11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA					5 1 1 5 11		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir			
130	5 1 1 5 12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA					5 1 1 5 12		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah			
131	5 1 1 5 13	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA					5 1 1 5 13		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet			
132	5 1 1 5 14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA					5 1 1 5 14		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
133	5 1 1 5 15	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA					5 1 1 5 15		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
134	5 1 1 5 16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA					5 1 1 5 16		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
135	5 1 1 6 1	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA					5 1 1 6 1		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
136	5 1 1 6 2	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA					5 1 1 6 2		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan			
137	5 1 1 6 3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA					5 1 1 6 3		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil			
138	5 1 1 6 4	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA					5 1 1 6 4		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
139	5 1 1 6 5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA					5 1 1 6 5		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
140	5 1 1 6 6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA					5 1 1 6 6		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar			
141	5 1 1 6 7	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA					5 1 1 6 7		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor			
142	5 1 1 6 8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA					5 1 1 6 8		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			
143	5 1 1 6 9	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA					5 1 1 6 9		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta			
144	5 1 1 6 10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					5 1 1 6 10		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			
145	5 1 1 6 11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA					5 1 1 6 11		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair			
146	5 1 1 6 12	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA					5 1 1 6 12		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang			

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING				URAIAN
			5	1	6	13	
147	5 1 1 6 13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan	5	1	6	13
148	5 1 1 6 14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	5	1	6	14
149	5 1 1 6 15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakalian Kekayaan Daerah	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakalian Kekayaan Daerah	5	1	6	15
150	5 1 1 6 16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	5	1	6	16
151	5 1 1 6 17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	5	1	6	17
152	5 1 1 6 18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	5	1	6	18
153	5 1 1 6 19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	5	1	6	19
154	5 1 1 6 20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5	1	6	20
155	5 1 1 6 21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5	1	6	21
156	5 1 1 6 22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	5	1	6	22
157	5 1 1 6 23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olahraga	5	1	6	23
158	5 1 1 6 24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air	5	1	6	24
159	5 1 1 6 25	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produk Usaha Daerah - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produk Usaha Daerah	5	1	6	25
160	5 1 1 6 26	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	5	1	6	26
161	5 1 1 6 27	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5	1	6	27
162	5 1 1 6 28	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	5	1	6	28
163	5 1 1 6 29	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	5	1	6	29
164	5 1 1 6 30	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikahan - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikahan	5	1	6	30
165	5 1 1 6 31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalulintas - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalulintas	5	1	6	31
166	5 1 1 6 32	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5	1	6	32
167				5	1	2	14
168				5	1	2	23
169	5 1 2 3 26	Belanja Jasa Publikasi	Belanja Jasa Publikasi	5	1	2	24
170	5 1 2 3 26	Belanja Jasa Publikasi	Belanja Jasa Publikasi	5	1	2	24
171				5	1	2	14
172				5	1	2	26
173	5 1 2 31	Belanja Pegawai BLUD	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5	1	2	31
174	5 1 2 31 1	Belanja Pegawai BLUD RSUD	Belanja Pegawai BLUD	5	1	2	31
175				5	1	2	31
176	5 1 2 32 1	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	Belanja Barang / Bahan / Material BLUD	5	1	2	32
177				5	1	2	32
178				5	1	2	3
179	5 1 2 35	Belanja Beaasiswa Pendidikan Non PHS	Belanja Subsidi Kepada Pemerintah	5	1	4	3
180	5 1 2 35 1	Belanja Beaasiswa Pendidikan Dasar	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	5	1	5	1
181	5 1 2 35 2	Belanja Beaasiswa Pendidikan Menengah	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota	5	1	5	2
182	5 1 2 35 3	Belanja Beaasiswa Penguruan Tinggi	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa	5	1	5	3
183	5 1 4 1 3	Belanja Subsidi Kepada Pinak Ketiga Lainnya	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Lainnya	5	1	5	4
184				5	1	4	4
185	5 1 5 1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	5	1	5	1
186	5 1 5 1 1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota	5	1	5	1
187	5 1 5 2 2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa	5	1	5	2
188	5 1 5 2 3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa/Kampung	5	1	5	7
189	5 1 5 4	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5	1	5	4
190	5 1 5 4 1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5	1	5	4
191				5	1	5	1
192				5	1	5	7
193				Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa/Kampung			
194	5 1 6 2 1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5	1	6	1
195				Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat			
196	5 2 1 11 9	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lere-lepe/ Setren dst	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lere-lepe/ Setren dst	5	2	1	11

NO	TAHUN ANGGARAN 2015				TAHUN ANGGARAN 2016			
	KODE REKENING	URAIAN		KODE REKENING	URAIAN			
197	6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
198	6 1 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		6 1 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah			
199		Transfer Dana Otonomi Khusus		6 2 3 2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kampung Lainnya			
200		Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota		6 2 3 2 1	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
201		Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota		6 2 3 2 2	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kampung Lainnya			
202	6 2 4 1	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota		6 2 4 1	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota			
203	6 2 4 1 1	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota		6 2 4 1 1	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota			
204				8 1 2 29 3	Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota - LO			
205	8 1 3 1 1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO		8 1 3 1 1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD - LO			
206	8 1 3 1 2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		8 1 3 1 2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tulang Bawang Jaya - LO			
207	8 1 3 2 1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		8 1 3 2 1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Pemerintah/BUMN - LO			
208	8 1 4 12 3	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LO						
209	8 1 4 19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO		8 1 4 19	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO			
210	8 1 4 19 1	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO		8 1 4 19 1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat - LO			
211				8 1 4 22 2	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya			
212	8 2 2 3 6	Dana Desa - LO		8 2 2 3 6	Dana Desa/Kampung - LO			
213	8 3 3 3	Pendapatan Lainnya - LO		8 3 3 3	Pendapatan Pelayanan Kesehatan Lainnya - LO			
214	8 3 3 3 1	Pendapatan Lainnya - LO		8 3 3 3 1	Pendapatan Pelayanan Kesehatan Lainnya - LO			
215				8 3 4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LO			
216				8 3 4 1	Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LO			
217				8 3 4 1 5	Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LO			
218	9 1 1	Beban Pegawai - LO		9 1 1	Beban Pegawai			
219	9 1 1 1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO		9 1 1 1 1	Beban Gaji dan Tunjangan			
220	9 1 1 1 1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		9 1 1 1 1 1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi			
221	9 1 1 1 2	Beban Tunjangan Keluarga - LO		9 1 1 1 2	Beban Tunjangan Keluarga			
222	9 1 1 1 3	Beban Tunjangan Jabatan - LO		9 1 1 1 3	Beban Tunjangan Jabatan			
223	9 1 1 1 4	Beban Tunjangan Fungsional - LO		9 1 1 1 4	Beban Tunjangan Fungsional			
224	9 1 1 1 5	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO		9 1 1 1 5	Beban Tunjangan Fungsional Umum			
225	9 1 1 1 6	Beban Tunjangan Beras - LO		9 1 1 1 6	Beban Tunjangan Beras			
226	9 1 1 1 7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		9 1 1 1 7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			
227	9 1 1 1 8	Beban Pembulatan Gaji - LO		9 1 1 1 8	Beban Pembulatan Gaji			
228	9 1 1 1 9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO		9 1 1 1 9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan			
229	9 1 1 1 10	Beban Uang Paket - LO		9 1 1 1 10	Beban Uang Paket			
230	9 1 1 1 11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO		9 1 1 1 11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah			
231	9 1 1 1 12	Beban Tunjangan Komisi - LO		9 1 1 1 12	Beban Tunjangan Komisi			
232	9 1 1 1 13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO		9 1 1 1 13	Beban Tunjangan Badan Anggaran			
233	9 1 1 1 14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO		9 1 1 1 14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan			
234	9 1 1 1 15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO		9 1 1 1 15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya			
235	9 1 1 1 16	Beban Tunjangan Perumahan - LO		9 1 1 1 16	Beban Tunjangan Perumahan			
236	9 1 1 1 17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO		9 1 1 1 17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas			
237	9 1 1 1 18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO		9 1 1 1 18	Beban Uang Jasa Pengabdian			
238	9 1 1 1 19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO		9 1 1 1 19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD			
239	9 1 1 1 20	Beban Tunjangan Khusus Bulanan/Operasional - LO		9 1 1 1 20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD			
240	9 1 1 1 21	Beban Tunjangan Kesejahteraan - LO		9 1 1 1 21	Beban Tunjangan Kesejahteraan			
241	9 1 1 1 22	Beban Asuransi - LO		9 1 1 1 22	Beban Asuransi			
242	9 1 1 1 23	Beban Biaya Pengobatan - LO		9 1 1 1 23	Beban Biaya Pengobatan			
243				9 1 1 1 24	Beban Uang Makan			
244	9 1 1 2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO		9 1 1 2	Beban Tambahan Penghasilan PNS			
245	9 1 1 2 1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO		9 1 1 2 1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
246	9 1 1 2 2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO		9 1 1 2 2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas			
247	9 1 1 2 3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO		9 1 1 2 3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja			

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
248	9 1 1 2 4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Profesi - LO	9 1 1 2 4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Profesi
249	9 1 1 2 5	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	9 1 1 2 5	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
250	9 1 1 2 6	Beban Tunjangan Pengelola Kelengaran Daerah - LO	9 1 1 2 6	Beban Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi)
251	9 1 1 2 7	Beban Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) - LO	9 1 1 2 7	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD
252	9 1 1 2 8	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	9 1 1 2 8	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD
253	9 1 1 3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9 1 1 3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
254	9 1 1 3 1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	9 1 1 3 1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
255	9 1 1 3 2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	9 1 1 3 2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH
256	9 1 1 3 3	Beban Tunjangan Badan Legislasi - LO	9 1 1 3 3	Beban Tunjangan Badan Legislasi
257	9 1 1 4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	9 1 1 4	Beban Pemungutan Pajak Daerah
258	9 1 1 4 1	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO	9 1 1 4 1	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
259	9 1 1 4 2	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	9 1 1 4 2	Beban Pemungutan Pajak Daerah
260	9 1 1 4 3	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO	9 1 1 4 3	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
261	9 1 1 4 4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO	9 1 1 4 4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
262	9 1 1 4 5	Beban Pemungutan PB8 - LO	9 1 1 4 5	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat
263			9 1 1 4 6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
264	9 1 1 5 1	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	9 1 1 5 1	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor
265	9 1 1 5 2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	9 1 1 5 2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
266	9 1 1 5 3	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9 1 1 5 3	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
267	9 1 1 5 4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	9 1 1 5 4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan
268	9 1 1 5 5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	9 1 1 5 5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
269	9 1 1 5 6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	9 1 1 5 6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
270	9 1 1 5 7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	9 1 1 5 7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
271	9 1 1 5 8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	9 1 1 5 8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
272	9 1 1 5 9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	9 1 1 5 9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
273	9 1 1 5 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	9 1 1 5 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
274	9 1 1 5 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	9 1 1 5 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
275	9 1 1 5 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	9 1 1 5 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
276	9 1 1 5 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO	9 1 1 5 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
277	9 1 1 5 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	9 1 1 5 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
278	9 1 1 5 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9 1 1 5 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
279	9 1 1 5 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	9 1 1 5 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
280	9 1 1 5 17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	9 1 1 5 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
281	9 1 1 6 1	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	9 1 1 6 1	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
282	9 1 1 6 2	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahtani Kebersihan - LO	9 1 1 6 2	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahtani Kebersihan
283	9 1 1 6 3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cataian Sipil - LO	9 1 1 6 3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cataian Sipil
284	9 1 1 6 4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaaman dan Pengubahan Mayat - LO	9 1 1 6 4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaaman dan Pengubahan Mayat
285	9 1 1 6 5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	9 1 1 6 5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
286	9 1 1 6 6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaaman dan Pengubahan Mayat - LO	9 1 1 6 6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaaman dan Pengubahan Mayat
287	9 1 1 6 7	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	9 1 1 6 7	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
288	9 1 1 6 8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	9 1 1 6 8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
289	9 1 1 6 9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengantian Biaya Cetak Peta - LO	9 1 1 6 9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengantian Biaya Cetak Peta
290	9 1 1 6 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyedotan Kakus - LO	9 1 1 6 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyedotan Kakus
291	9 1 1 6 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO	9 1 1 6 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair
292	9 1 1 6 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	9 1 1 6 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang
293	9 1 1 6 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO	9 1 1 6 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan
294	9 1 1 6 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Memara Telekomunikasi - LO	9 1 1 6 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Memara Telekomunikasi
295	9 1 1 6 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9 1 1 6 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemanfaatan Kekayaan Daerah
296	9 1 1 6 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertoakan - LO	9 1 1 6 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertoakan
297	9 1 1 6 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO	9 1 1 6 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan

NO	TAHUN ANGGARAN 2015						TAHUN ANGGARAN 2016					
	KODE REKENING		URAIAN				KODE REKENING		URAIAN			
298	9	1	1	6	18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	9	1	1	6	18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
299	9	1	1	6	19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO	9	1	1	6	19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir
300	9	1	1	6	20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	9	1	1	6	20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
301	9	1	1	6	21	Beban Inseitif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	9	1	1	6	21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan
302	9	1	1	6	22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO	9	1	1	6	22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan
303	9	1	1	6	23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	9	1	1	6	23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
304	9	1	1	6	24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO	9	1	1	6	24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air
305	9	1	1	6	25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	9	1	1	6	25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah
306	9	1	1	6	26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	9	1	1	6	26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
307	9	1	1	6	27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	9	1	1	6	27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
308	9	1	1	6	28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO	9	1	1	6	28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
309	9	1	1	6	29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	9	1	1	6	29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
310	9	1	1	6	30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	9	1	1	6	30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan
311	9	1	1	6	31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO	9	1	1	6	31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas
312	9	1	1	6	32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	9	1	1	6	32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
313	9	1	1	7		Beban Uang Lembur - LO	9	1	1	7		Beban Uang Lembur
314	9	1	1	7	1	Beban Uang Lembur PNS - LO	9	1	1	7	1	Beban Uang Lembur PNS
315	9	1	1	7	2	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	9	1	1	7	2	Beban Uang Lembur Non PNS
316							9	1	2	2	14	Beban Persediaan Materi Promosi
317	9	1	2	3	23	Beban Jasa Instruktur/Narasumber/Tanaga Ahli (PNS)	9	1	2	3	23	Beban Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul
318	9	1	2	3	24	Beban Jasa Instruktur/Narasumber/Tanaga Ahli (Non PNS)	9	1	2	3	24	Beban Jasa Publikasi
319	9	1	2	3	25	Beban Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul						
320	9	1	2	3	26	Beban Jasa Publikasi						
321	9	1	2	10	9	Beban Sewa Alat-alat Olahraga	9	1	2	10	9	Beban Sewa Alat-alat Olahraga
322							9	1	2	14	7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya
323	9	1	2	25		Beban Honorarium PNS - LO	9	1	2	25		Beban Honorarium PNS
324	9	1	2	25	1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	9	1	2	25	1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
325	9	1	2	25	2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	9	1	2	25	2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
326	9	1	2	25	3	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	9	1	2	25	3	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
327	9	1	2	25	4	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	9	1	2	25	4	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan
328							9	1	2	25	5	Beban Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
329							9	1	2	25	6	Beban Honorarium PNS Lainnya
330	9	1	2	26		Beban Honorarium Non PNS - LO	9	1	2	26		Beban Honorarium Non PNS
331	9	1	2	26	1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	9	1	2	26	1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
332	9	1	2	26	2	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	9	1	2	26	2	Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
333							9	1	2	26	3	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS
334							9	1	2	26	4	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
335							9	1	2	26	5	Beban Honorarium Non PNS Lainnya
336							9	1	2	30	2	Dst
337	9	1	2	31		Beban Belanja Pegawai BLUD	9	1	2	31		Beban Belanja Pegawai dan Pelayanan BLUD
338	9	1	2	32	1	Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD	9	1	2	32	1	Beban Barang/Bahan/Material BLUD RSUD
339							9	1	2	32	2	Beban Pemeliharaan BLUD RSUD
340							9	1	2	32	3	Beban Jasa BLUD RSUD
341	9	1	2	35		Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS						
342	9	1	2	35	1	Beban Beasiswa Pendidikan Dasar						
343	9	1	2	35	2	Beban Beasiswa Pendidikan Menerengah						
344	9	1	2	35	3	Beban Beasiswa Perguruan Tinggi						
345	9	1	4	1	3	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	9	1	4	1	3	Beban Subsidi Kepada Lembaga
346							9	1	4	1	4	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
347	9	1	5	1		Beban Hibah kepada Pemerintah	9	1	5	1		Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

NO	TAHUN ANGGARAN 2015					TAHUN ANGGARAN 2016				
	KODE REKENING	URATAN				KODE REKENING	URAIAN			
348	9 1 5 1 1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah				9 1 5 1 1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat			
349	9 1 5 2 2	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota				9 1 5 2 2	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota			
350	9 1 5 2 3	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota				9 1 5 2 3	Beban Hibah kepada Pemerintah Desa			
351						9 1 5 2 4	Beban Hibah kepada Pemerintah Lainnya			
352	9 1 5 4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat				9 1 5 4	Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat			
353	9 1 5 4 1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat				9 1 5 4 1	Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat			
354						9 1 5 7	Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung			
355						9 1 5 7 1	Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung			
356	9 1 6 2 1	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat				9 1 6 2 1	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat			
357						9 1 6 2 2	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat			
358						9 2 5 2	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kampung Lainnya			
359						9 2 5 2 1	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
360						9 2 5 2 2	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kampung Lainnya			



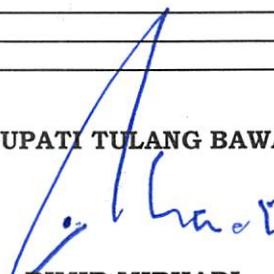
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

TABEL 3
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1	ASET	
1 1	ASET LANCAR	
1 1 1	Kas	D
1 1 1 1	Kas di Kas Daerah	
1 1 1 1 1	Kas di Giro Bank Mandiri	
1 1 1 1 2	Kas di Giro Bank Lampung	
1 1 1 1 3	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 4	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 5	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 6	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 7	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 8	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 9	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 10	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 11	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 12	Kas di Deposito Bank Lampung	
1 1 1 1 13	Kas di Deposito Bank Mandiri	
1 1 1 1 14	Kas di Deposito Bank Mandiri	
1 1 1 2	Kas di Bendahara Penerimaan	
1 1 1 2 1	Kas di Bendahara Penerimaan	
1 1 1 3	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1 1 1 3 1	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	
1 1 1 3 2	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	
1 1 1 4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	
1 1 1 4 1	Kas Di Bendahara BLUD	
1 1 1 4 2	Kas Di Bendahara BLUD - Bank	
1 1 1 5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	
1 1 1 5 1	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	
1 1 1 6	Kas di Bendahara BOS	
1 1 1 6 1	Kas di Bendahara BOS	
1 1 1 7	Setara Kas	
1 1 1 7 1	Setara Kas	
1 1 2	Investasi Jangka Pendek	D
1 1 2 1	Investasi dalam Saham	
1 1 2 1 1	Investasi dalam Saham	
1 1 2 2	Investasi dalam Deposito	
1 1 2 2 1	Deposito pada.....	
1 1 2 3	Investasi Dalam SUN	
1 1 2 3 1	Investasi Dalam SUN	
1 1 2 4	Investasi Dalam SBI	
1 1 2 4 1	Investasi Dalam SBI	
1 1 2 5	Investasi Dalam SPN	
1 1 2 5 1	Investasi Dalam SPN	
1 1 2 6	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1 1 2 6 1	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1 1 2 7	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1 1 2 7 1	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1 1 3	Piutang Pendapatan	D
1 1 3 1	Piutang Pajak Daerah	
1 1 3 1 1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	
1 1 3 1 2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1 1 3 1 3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1 1 3 1 4	Piutang Pajak Air Permukaan	
1 1 3 1 5	Piutang Pajak Rokok	
1 1 3 1 6	Piutang Pajak Hotel	
1 1 3 1 7	Piutang Pajak Restoran	
1 1 3 1 8	Piutang Pajak Hiburan	
1 1 3 1 9	Piutang Pajak Reklame	
1 1 3 1 10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	
1 1 3 1 11	Piutang Pajak Parkir	
1 1 3 1 12	Piutang Pajak Air Tanah	
1 1 3 1 13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	
1 1 3 1 14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1 1 3 1 15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
1 1 3 1 16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1 1 3 1 17	Piutang Pajak Lingkungan	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 2 1 3	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 1 3 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D
9 2 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 2 2 1 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 2 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 2 2 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 2 2 3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 2 3 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D
9 2 3 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 2 3 1 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 2 3 2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 2 3 2 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 2 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D
9 2 4 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 2 4 1 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 2 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D
9 2 5 1	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 2 5 1 1	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 2 5 2	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kampung Lainnya	
9 2 5 2 1	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 2 5 2 2	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kampung Lainnya	
9 2 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	D
9 2 6 1	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 2 6 1 1	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	
9 3 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D
9 3 1 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9 3 1 1 1	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9 3 1 1 2	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9 3 1 1 3	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9 3 1 1 4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
9 3 1 1 5	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9 3 1 1 6	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9 3 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D
9 3 2 1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9 3 2 1 1	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9 3 2 1 2	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
9 3 2 1 3	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9 3 2 1 4	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9 3 2 1 5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9 3 2 1 6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9 3 2 1 7	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9 3 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D
9 3 3 1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 3 3 1 1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	
9 3 3 1 2	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9 3 3 1 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 4	BEBAN LUAR BIASA	
9 4 1	Beban Luar Biasa	D
9 4 1 1	Beban Luar Biasa	
9 4 1 1 1	Beban Tak Terduga	
9 4 1 1 2	Beban Bencana Alam	
9 4 1 1 3	Beban Luar Biasa Lainnya	

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

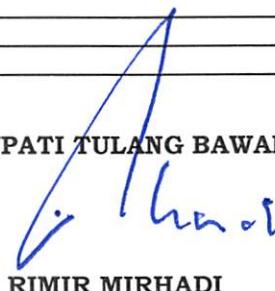


RIMIR MIRHADI

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN IV	
4 KABAG HUKUM	
5 KA. BPKAD	
6 SEK. BPKAD	
7 KABID	
8 KASUBBID	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 2 1 3	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 1 3 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D
9 2 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 2 2 1 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 2 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 2 2 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 2 2 3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 2 3 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	
9 2 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D
9 2 3 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 2 3 1 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 2 3 2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kot <i>a</i>	
9 2 3 2 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 2 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D
9 2 4 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 2 4 1 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 2 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D
9 2 5 1	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 2 5 1 1	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 2 5 2	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kampung Lainnya	
9 2 5 2 1	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 2 5 2 2	Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kampung Lainnya	
9 2 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	D
9 2 6 1	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 2 6 1 1	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	
9 3 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D
9 3 1 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9 3 1 1 1	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9 3 1 1 2	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9 3 1 1 3	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9 3 1 1 4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
9 3 1 1 5	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9 3 1 1 6	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9 3 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D
9 3 2 1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9 3 2 1 1	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9 3 2 1 2	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
9 3 2 1 3	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9 3 2 1 4	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9 3 2 1 5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9 3 2 1 6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9 3 2 1 7	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9 3 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D
9 3 3 1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 3 3 1 1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	
9 3 3 1 2	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9 3 3 1 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 4	BEBAN LUAR BIASA	
9 4 1	Beban Luar Biasa	D
9 4 1 1	Beban Luar Biasa	
9 4 1 1 1	Beban Tak Terduga	
9 4 1 1 2	Beban Bencana Alam	
9 4 1 1 3	Beban Luar Biasa Lainnya	

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,



RIMIR MIRHADI



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TABEL 3
MAPPING REKENING AKUN

REKENING PERMENDAGRI 13		REKENING AKRUAL		MAPPING 1		MAPPING 2	
1	1	1	1	Kas di Giro Bank Mandiri	1	1	1
1	1	1	2	Kas di Giro Bank Lampung	1	1	2
1	1	1	3	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	3
1	1	1	4	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	4
1	1	1	5	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	5
1	1	1	6	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	6
1	1	1	7	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	7
1	1	1	8	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	8
1	1	1	9	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	9
1	1	1	10	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	10
1	1	1	11	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	11
1	1	1	12	Kas di Deposito Bank Lampung	1	1	12
1	1	1	13	Kas di Deposito Bank Mandiri	1	1	13
1	1	1	14	Kas di Deposito Bank Mandiri	1	1	14
1	1	1	2	Kas Di Bendahara Penitamaan	1	1	2
1	1	1	3	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	1	1	3
1	1	1	3	2 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	1	1	3
1	1	1	4	1 Kas Di Bendahara BLUD	1	1	4
1	1	1	5	1 Kas Di bendahara Kapitalis JKN - Puskesmas	1	1	5
1	1	1	6	Kas Di Bendahara BOS	1	1	6
1	1	1	7	Sekira Kas	1	1	7
1	1	2	1	Investasi Dalam Saham	1	1	2
1	1	2	2	Investasi Dalam Oli/gasi	1	1	3
1	1	2	3	1 Deposito pada	1	1	2
1	1	3	1	Pluitang Pajak Kendaraan Bermotor	1	1	3
1	1	3	1	2 Pluitang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	1	3
1	1	3	1	3 Pluitang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	1	3
1	1	3	1	4 Pluitang Pajak Air Permuksaan	1	1	4
1	1	3	1	5 Pluitang Pajak Rokok	1	1	5
1	1	3	1	6 Pluitang Pajak Hotel	1	1	6
1	1	3	1	7 Pluitang Pajak Restoran	1	1	7
1	1	3	1	8 Pluitang Pajak Hiburan	1	1	8
1	1	3	1	9 Pluitang Pajak Reklame	1	1	9
1	1	3	1	10 Pluitang Pajak Penerangan Jalan	1	1	10
1	1	3	1	11 Pluitang Pajak Parkir	1	1	11
1	1	3	1	12 Pluitang Pajak Air Tanah	1	1	12
1	1	3	1	13 Pluitang Pajak Sarang Burung Walet	1	1	13
1	1	3	1	14 Pluitang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	1	14
1	1	3	1	15 Pluitang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	1	15
1	1	3	1	16 Pluitang Bea Pendebutan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1	1	16
1	1	3	1	17 Pluitang Pajak Lingkungan	1	1	17
1	1	3	2	1 Pluitang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1	1	2
1	1	3	2	2 Pluitang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1	1	2
1	1	3	2	3 Pluitang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	1	1	3
1	1	3	2	4 Pluitang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mavat	1	1	4
1	1	3	2	5 Pluitang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Mavat	1	1	5

REKENING PERMENDAGRI 13	REKENING AKRUAL	MAPPING 1	MAPPING 2
6 2 3 4 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank	7 2 3 2 1 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 2 1 2 1 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
6 2 3 5 1 Penerusan Pinjaman	7 2 3 4 1 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	2 2 1 4 1 Utang Pemerintah Pusat	
6 2 3 6 1 Pemerintah Daerah	7 2 3 5 1 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	2 2 1 5 1 Utang Kepada Pemerintah Provinsi	
6 2 3 7 1 Bank	7 2 3 1 1 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	2 2 1 1 1 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
6 2 3 8 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank	7 2 3 2 1 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 2 1 2 1 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
6 2 3 9 1 Obligasi	7 2 3 3 1 Pelunasan Obligasi Daerah	2 2 1 3 1 Utang Dalam Negeri-Obligasi	
6 2 3 10 1 Obligasi	7 2 3 3 1 Pelunasan Obligasi Daerah	2 2 1 3 1 Utang Dalam Negeri-Obligasi	
6 2 4 1 1 Pemerintah	7 2 4 3 1 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	1 2 1 1 4 Investasi kepada Pemerintah Pusat	
6 2 4 2 1 Pemerintah Daerah	7 2 4 2 1 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	1 2 1 1 5 Investasi kepada Pemerintah Daerah	
6 2 5 1 1 Perhitungan Pihak Ketiga	7 2 3 7 1 Pembayaran Pokok Pinjaman Lainnya	2 1 6 4 1 Utang Jangka Pendek Lainnya	
6 3 1 1 1 Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkenaan	7 3 2 1 1 Pembayaran Netto	7 3 4 1 1 Perubahan SAL	
6 4 1 1 1 Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Tahun Berkenaan	7 3 3 1 1 SILPA/SIKPA	7 3 4 1 1 Perubahan SAL	
7 1 1 1 1 Penerimaan PFK - IWP	2 1 1 6 1 Utang Iuran Wajib Pegawai	2 1 1 6 1 Utang Iuran Wajib Pegawai	
7 1 1 2 1 Penerimaan PFK - Taspen	2 1 1 1 1 Utang Taspen	2 1 1 1 1 Utang Taspen	
7 1 1 2 2 Penerimaan PFK - JKK	2 1 1 1 2 Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)	2 1 1 1 2 Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)	
7 1 1 2 3 Penerimaan PFK - JKM	2 1 1 1 3 Utang Jaminan Kematian (JKM)	2 1 1 1 3 Utang Jaminan Kematian (JKM)	
7 1 1 3 1 Penerimaan PFK - Askes (BPJS)	2 1 1 2 1 Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2 1 1 2 1 Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
7 1 1 4 1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	2 1 1 3 1 Utang PPh 21	2 1 1 3 1 Utang PPh 21	
7 1 1 4 2 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	2 1 1 3 2 Utang PPh 22	2 1 1 3 2 Utang PPh 22	
7 1 1 4 3 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	2 1 1 3 3 Utang PPh 23	2 1 1 3 3 Utang PPh 23	
7 1 1 4 4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 25	2 1 1 3 4 Utang PPh 25	2 1 1 3 4 Utang PPh 25	
7 1 1 4 5 Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	2 1 1 3 5 Utang PPh Ps 4 (2)	2 1 1 3 5 Utang PPh Ps 4 (2)	
7 1 1 4 6 Penerimaan PFK - PPh Ps. 15	2 1 1 3 6 Utang PPh 15	2 1 1 3 6 Utang PPh 15	
7 1 1 4 7 Penerimaan PFK - PPh Ps. 26	2 1 1 3 7 Utang PPh 26	2 1 1 3 7 Utang PPh 26	
7 1 1 5 1 Penerimaan PFK - PPn Pusat	2 1 1 4 1 Utang PPn Pusat	2 1 1 4 1 Utang PPn Pusat	
7 1 1 6 1 Penerimaan PFK - Taperum	2 1 1 5 1 Utang Taperum	2 1 1 5 1 Utang Taperum	
7 1 1 7 1 Penerimaan PFK - Lainnya	2 1 1 7 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	2 1 1 7 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
7 1 1 7 2 Penerimaan PFK - Sewa Rumah	2 1 1 7 2 Utang Sewa Rumah	2 1 1 7 2 Utang Sewa Rumah	
7 1 1 7 3 Penérimaan PFK - Beras (BULOG)	2 1 1 7 3 Utang Beras (BULOG)	2 1 1 7 3 Utang Beras (BULOG)	
7 2 1 1 1 Pengeluaran PFK - IWP	2 1 1 6 1 Utang Iuran Wajib Pegawai	2 1 1 6 1 Utang Iuran Wajib Pegawai	
7 2 1 2 1 Pengeluaran PFK - Taspen	2 1 1 1 1 Utang Taspen	2 1 1 1 1 Utang Taspen	
7 2 1 2 2 Pengeluaran PFK - JKK	2 1 1 1 2 Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)	2 1 1 1 2 Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)	
7 2 1 2 3 Pengeluaran PFK - JKM	2 1 1 1 3 Utang Jaminan Kematian (JKM)	2 1 1 1 3 Utang Jaminan Kematian (JKM)	
7 2 1 3 1 Pengeluaran PFK- Askes (BPJS)	2 1 1 2 1 Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2 1 1 2 1 Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
7 2 1 4 1 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	2 1 1 3 1 Utang PPh 21	2 1 1 3 1 Utang PPh 21	
7 2 1 4 2 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	2 1 1 3 2 Utang PPh 22	2 1 1 3 2 Utang PPh 22	
7 2 1 4 3 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	2 1 1 3 3 Utang PPh 23	2 1 1 3 3 Utang PPh 23	
7 2 1 4 4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25	2 1 1 3 4 Utang PPh 25	2 1 1 3 4 Utang PPh 25	
7 2 1 4 5 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4	2 1 1 3 5 Utang PPh Ps 4 (2)	2 1 1 3 5 Utang PPh Ps 4 (2)	
7 2 1 4 6 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15	2 1 1 3 6 Utang PPh 15	2 1 1 3 6 Utang PPh 15	
7 2 1 4 7 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 26	2 1 1 3 7 Utang PPh 26	2 1 1 3 7 Utang PPh 26	
7 2 1 5 1 Pengeluaran PFK - PPn Pusat	2 1 1 4 1 Utang PPn Pusat	2 1 1 4 1 Utang PPn Pusat	
7 2 1 6 1 Pengeluaran PFK - Taperum	2 1 1 5 1 Utang Taperum	2 1 1 5 1 Utang Taperum	
7 2 1 7 1 Pengeluaran PFK - Lainnya	2 1 1 7 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	2 1 1 7 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
7 2 1 7 2 Pengeluaran PFK - Sewa Rumah	2 1 1 7 2 Utang Sewa Rumah	2 1 1 7 2 Utang Sewa Rumah	
7 2 1 7 3 Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)	2 1 1 7 3 Utang Beras (BULOG)	2 1 1 7 3 Utang Beras (BULOG)	

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN IV
4 KABAG HUKUM
5 KA. BPKAD
6 SEK. BPKAD
7 KABID
8 KASUBBID

Pit. BUPATI TULANG BAWANG,



RIMIR MIRHADI

REKENING PERMENDAGRI 13					REKENING AKRUAL					MAPPING 1					MAPPING 2				
6 2 3 4 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank	7 2 3 2 1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		2 2 1 2 1	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank													
6 2 3 5 1	Penerusan Pinjaman	7 2 3 4 1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		2 2 1 4 1	Utang Pemerintah Pusat													
6 2 3 6 1	Pemerintah Daerah	7 2 3 5 1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya		2 2 1 5 1	Utang Kepada Pemerintah Provinsi													
6 2 3 7 1	Bank	7 2 3 1 1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank		2 2 1 1 1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan													
6 2 3 8 1	Lembaga Keuangan Bukan Bank	7 2 3 2 1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		2 2 1 2 1	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank													
6 2 3 9 1	Obligasi	7 2 3 3 1	Pelunasan Obligasi Daerah		2 2 1 3 1	Utang Dalam Negeri-Obligasi													
6 2 3 10 1	Obligasi	7 2 3 3 1	Pelunasan Obligasi Daerah		2 2 1 3 1	Utang Dalam Negeri-Obligasi													
6 2 4 1 1	Pemerintah	7 2 4 3 1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		1 2 1 1 4	Investasi kepada Pemerintah Pusat													
6 2 4 2 1	Pemerintah Daerah	7 2 4 2 1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah		1 2 1 1 5	Investasi kepada Pemerintah Daerah													
6 2 5 1 1	Perhitungan Pihak Ketiga	7 2 3 7 1	Pembayaran Pokok Pinjaman Lainnya		2 1 6 4 1	Utang Jangka Pendek Lainnya													
6 3 1 1 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	7 3 2 1 1	Pembiayaan Netto		7 3 4 1 1	Perubahan SAL													
6 4 1 1 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	7 3 3 1 1	SILPA/SIKPA		7 3 4 1 1	Perubahan SAL													
7 1 1 1 1	Penerimaan PFK - IWP	2 1 1 6 1	Utang Iuran Wajib Pegawai		2 1 1 6 1	Utang Iuran Wajib Pegawai													
7 1 1 2 1	Penerimaan PFK - Taspen	2 1 1 1 1	Utang Taspen		2 1 1 1 1	Utang Taspen													
7 1 1 2 2	Penerimaan PFK - JKJ	2 1 1 1 2	Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)		2 1 1 1 2	Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)													
7 1 1 2 3	Penerimaan PFK - JKM	2 1 1 1 3	Utang Jaminan Kematian (JKM)		2 1 1 1 3	Utang Jaminan Kematian (JKM)													
7 1 1 3 1	Penerimaan PFK - Askes (BPJS)	2 1 1 2 1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		2 1 1 2 1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan													
7 1 1 4 1	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	2 1 1 3 1	Utang PPh 21		2 1 1 3 1	Utang PPh 21													
7 1 1 4 2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	2 1 1 3 2	Utang PPh 22		2 1 1 3 2	Utang PPh 22													
7 1 1 4 3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	2 1 1 3 3	Utang PPh 23		2 1 1 3 3	Utang PPh 23													
7 1 1 4 4	Penerimaan PFK - PPh Ps. 25	2 1 1 3 4	Utang PPh 25		2 1 1 3 4	Utang PPh 25													
7 1 1 4 5	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	2 1 1 3 5	Utang PPh Ps 4 (2)		2 1 1 3 5	Utang PPh Ps 4 (2)													
7 1 1 4 6	Penerimaan PFK - PPh Ps. 15	2 1 1 3 6	Utang PPh 15		2 1 1 3 6	Utang PPh 15													
7 1 1 4 7	Penerimaan PFK - PPh Ps. 26	2 1 1 3 7	Utang PPh 26		2 1 1 3 7	Utang PPh 26													
7 1 1 5 1	Penerimaan PFK - PPn Pusat	2 1 1 4 1	Utang PPn Pusat		2 1 1 4 1	Utang PPn Pusat													
7 1 1 6 1	Penerimaan PFK - Taperum	2 1 1 5 1	Utang Taperum		2 1 1 5 1	Utang Taperum													
7 1 1 7 1	Penerimaan PFK - Lainnya	2 1 1 7 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		2 1 1 7 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya													
7 1 1 7 2	Penerimaan PFK - Sewa Rumah	2 1 1 7 2	Utang Sewa Rumah		2 1 1 7 2	Utang Sewa Rumah													
7 1 1 7 3	Penerimaan PFK - Beras (BULOG)	2 1 1 7 3	Utang Beras (BULOG)		2 1 1 7 3	Utang Beras (BULOG)													
7 2 1 1 1	Pengeluaran PFK - IWP	2 1 1 6 1	Utang Iuran Wajib Pegawai		2 1 1 6 1	Utang Iuran Wajib Pegawai													
7 2 1 2 1	Pengeluaran PFK - Taspen	2 1 1 1 1	Utang Taspen		2 1 1 1 1	Utang Taspen													
7 2 1 2 2	Pengeluaran PFK - JKJ	2 1 1 1 2	Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)		2 1 1 1 2	Utang Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)													
7 2 1 2 3	Pengeluaran PFK - JKM	2 1 1 1 3	Utang Jaminan Kematian (JKM)		2 1 1 1 3	Utang Jaminan Kematian (JKM)													
7 2 1 3 1	Pengeluaran PFK- Askes (BPJS)	2 1 1 2 1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		2 1 1 2 1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan													
7 2 1 4 1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	2 1 1 3 1	Utang PPh 21		2 1 1 3 1	Utang PPh 21													
7 2 1 4 2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	2 1 1 3 2	Utang PPh 22		2 1 1 3 2	Utang PPh 22													
7 2 1 4 3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	2 1 1 3 3	Utang PPh 23		2 1 1 3 3	Utang PPh 23													
7 2 1 4 4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25	2 1 1 3 4	Utang PPh 25		2 1 1 3 4	Utang PPh 25													
7 2 1 4 5	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4	2 1 1 3 5	Utang PPh Ps 4 (2)		2 1 1 3 5	Utang PPh Ps 4 (2)													
7 2 1 4 6	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15	2 1 1 3 6	Utang PPh 15		2 1 1 3 6	Utang PPh 15													
7 2 1 4 7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 26	2 1 1 3 7	Utang PPh 26		2 1 1 3 7	Utang PPh 26													
7 2 1 5 1	Pengeluaran PFK - PPn Pusat	2 1 1 4 1	Utang PPn Pusat		2 1 1 4 1	Utang PPn Pusat													
7 2 1 6 1	Pengeluaran PFK - Taperum	2 1 1 5 1	Utang Taperum		2 1 1 5 1	Utang Taperum													
7 2 1 7 1	Pengeluaran PFK - Lainnya	2 1 1 7 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		2 1 1 7 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya													
7 2 1 7 2	Pengeluaran PFK - Sewa Rumah	2 1 1 7 2	Utang Sewa Rumah		2 1 1 7 2	Utang Sewa Rumah													
7 2 1 7 3	Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)	2 1 1 7 3	Utang Beras (BULOG)		2 1 1 7 3	Utang Beras (BULOG)													

Pit. BUPATI TULANG BAWANG,



RIMIR MIRHADI